



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI
TAHUN 2017 - 2022**

TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Tuntutan publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) yang memiliki prinsip-prinsip transparansi, partisipatis, dan akuntabel, merupakan isu yang paling krusial semenjak bergulirnya reformasi pemerintahan di Indonesia. Isu tentang *good governance* dan *clean governance* menghendaki perlunya organisasi pemerintah melaksanakan akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban dan dilakukan secara periodik. Dalam era terdahulu, kinerja penyelenggaraan organisasi pemerintah hampir tidak pernah diukur, karena memang tidak adanya target kinerja yang dibebankan. Keberhasilan maupun kegagalan penyelenggaraan organisasi pemerintah masih menggunakan tolak ukur tradisional dimana instrumen kinerja yang sering digunakan masih terbatas pada bagaimana mengalokasikan atau menggunakan sumber daya (input) untuk menghasilkan barang dan jasa (output) sesuai rencana yang disepakati, misalnya seberapa besar tingkat penyerapan (realisasi) anggaran dari rencana yang telah ditetapkan atau seberapa tepat output yang direncanakan dapat dicapai. Akibatnya publik tidak pernah dapat menilai pertanggungjawaban (akuntabilitas) terhadap jalannya organisasi pemerintah. Padahal sebagai *stake holder*, publik memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban dari organisasi pemerintah itu.

Oleh karena itu untuk merespon hal demikian serta agar pelaksanaan pemerintahan lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab, presiden mengeluarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sesuai dengan Perpres tersebut dikembangkanlah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis (proses penyusunan rencana strategis) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis adalah salah satu cara untuk mengantisipasi masa depan, perencanaan strategis adalah cara lain untuk membuat keputusan berdasarkan pandangan ke depan (Osborn dan Gaebler, 2000 : 263). Menurut Olsen dan Eadie (Bryson, 2001 : 5) perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Dari kedua pengertian tentang perencanaan strategis di atas, dapat diambil satu pengertian inti bahwa perencanaan strategis adalah proses penelitian situasi dengan pengumpulan informasi yang secara luas, eksplorasi alternatif, dan menetapkan implikasi masa depan pada keputusan sekarang. Perencanaan strategis berangkat dari logika dasar bahwa dalam lingkungan yang berubah secara cepat dan tak menentu, organisasi harus adaptif dan memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan perencanaan dan manajemen secara tepat. Dalam situasi lingkungan yang selalu berubah, maka kemampuan untuk senantiasa melakukan responsibilitas terhadap lingkungan eksternal dari organisasi, serta upaya terus menerus menilai kekuatan dan kelemahan internal, merupakan prasyarat agar organisasi selalu berada pada kondisi strategis. Oleh karena itu proses perumusan perencanaan strategis membutuhkan pemahaman yang luas dan mendalam, serta memaksimalkan sumber daya yang ada, agar perencanaan strategis yang dihasilkan mampu membawa organisasi pada kondisi strategis untuk mencapai tujuannya secara efektif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah ini memuat antara lain, Pendahuluan, Gambaran pelayanan perangkat daerah, Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, Tujuan dan sasaran, Strategi dan arah kebijakan, Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, dan Penutup.

Dokumen rencana strategis perangkat daerah tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 Kota Tebing Tinggi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaaa, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
10. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Sekretariat

Daerah Kota Tebing Tinggi serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sesuai Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah untuk mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam pencapaian visi misi Pemerintah Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat agar selaras dengan program prioritas Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penulisan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang gambaran tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan tantangan, peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat penjelasan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, telaahan visi, misi, dan program kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, penentuan isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat penjelasan tentang rumusan pernyataan strategis dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang yaitu 2017-2022.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Memuat penjelasan indikator perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi merupakan salah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang mempunyai kedudukan sebagai unsur staf. Sebagai unsur staf, kedudukan Sekretariat Daerah Kota dalam sistem organisasi pemerintahan sangat strategis karena tugasnya sebagai koordinator seluruh OPD-OPD yang ada.

2.1.1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 1 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang meliputi dinas daerah, badan daerah kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administratif.

2.1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi, struktur organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Asisten.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagai berikut :

1. **Sekretaris Daerah** yang membawahi dan mengoordinasikan :

1.1. **Asisten Administrasi Pemerintahan**, yang membawahi dan mengoordinasikan :

1.1.1. **Bagian Administrasi Pemerintahan**, terdiri dari :

- 1.1.1.1. Sub Bagian Pemerintahan Umum,
- 1.1.1.2. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama
- 1.1.1.3. Sub Bagian Pertanahan dan Administrasi Wilayah

1.1.2. **Bagian Hukum**, terdiri dari :

- 1.1.2.1. Sub Bagian Perundang-Undangan
- 1.1.2.2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi
- 1.1.2.3. Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

1.1.3. **Bagian Organisasi**, terdiri dari :

- 1.1.3.1. Sub Bagian Kelembagaan
- 1.1.3.2. Sub Bagian Tata Laksana
- 1.1.3.3. Sub Bagian Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Kinerja

1.2. **Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**, yang membawahi dan mengoordinasikan :

1.2.1. **Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan**, terdiri dari :

- 1.2.1.1. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
- 1.2.1.2. Sub Bagian Pemberdayaan Potensi Daerah dan Sumber Daya Alam
- 1.2.1.3. Sub Bagian Administrasi Pembangunan

1.2.2. **Bagian Kesejahteraan Rakyat**, terdiri dari :

- 1.2.2.1. Sub Bagian Bina Sumber Daya Masyarakat
- 1.2.2.2. Sub Bagian Bina Agama
- 1.2.2.3. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat

1.3 Asisten Administrasi Umum, yang membawahi dan mengoordinasikan :

1.3.1 Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan, terdiri dari :

1.2.2.4. Sub Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah

1.2.2.5. Sub Bagian Rumah Tangga

1.2.2.6. Sub Bagian Perlengkapan

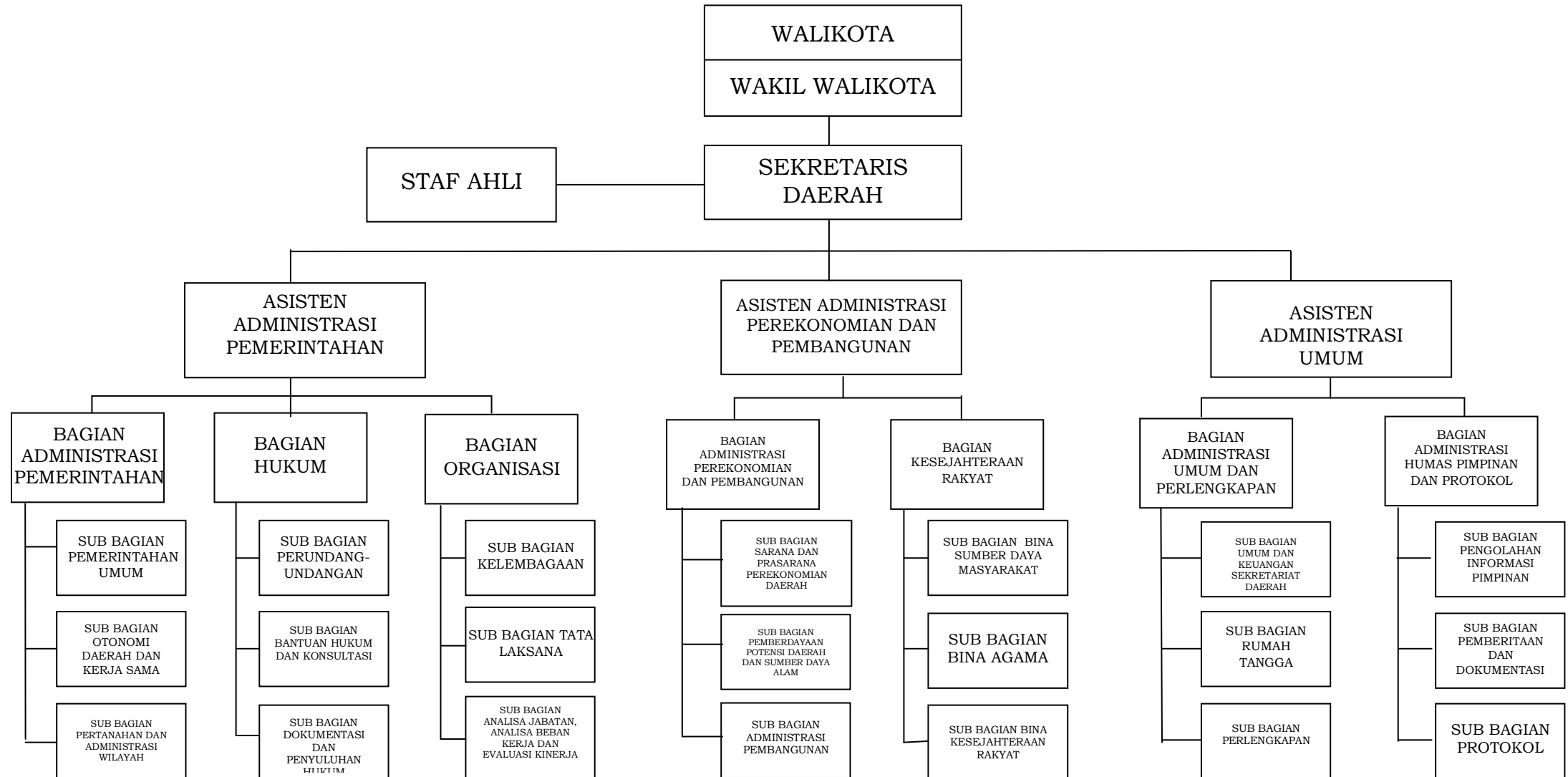
1.3.2 Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol, terdiri dari :

1.2.2.7. Sub Bagian Pengolahan Informasi Pimpinan

1.2.2.8. Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi

1.2.2.9. Sub Bagian Protokol dan Acara

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Ada tiga komponen utama yang sangat berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja organisasi, yaitu sumber daya aparatur, sumber daya dana, dan sumber daya teknologi. Ketiga sumber daya tersebut saling berinteraksi satu sama lain, saling terkait, dan saling mendukung, namun begitu sumber daya aparatur dinilai sebagai unsur yang paling berperan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Atas dasar penilaian tersebut, upaya-upaya peningkatan kapasitas (*capacity building*) aparatur yang diikuti dengan peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan integritas menjadi fokus utama organisasi dalam peningkatan kapasitas organisasi.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Sekretariat yang berkedudukan sebagai unsur staf dengan tugas utama membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan dan mengoordinasikan OPD-OPD lainnya, ketersediaan aparatur baik dalam jumlah dan kompetensi mutlak diperlukan. Penilaian kompetensi dalam penempatan dan pengisian formasi jabatan merupakan aspek yang diutamakan, disamping penilaian dari aspek lainnya seperti pengalaman kerja, perilaku, tanggungjawab, dan integritas.

Jumlah ASN perempuan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di pemerintahan sama besarnya dengan kesempatan bagi kaum laki-laki. Dari jumlah keseluruhan ASN Sekretariat Daerah sebanyak 145 orang, jumlah ASN perempuan saat ini sebanyak 61 orang (42,07%), tentunya tidak berbeda jauh dari jumlah ASN laki-laki yang jumlahnya 84 orang (57,93%). Secara rinci Jumlah ASN berdasarkan jenis kelamin yang terdistribusi pada unit-unit kerja Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Jumlah ASN dilingkungan Setdako Tebing Tinggi berdasarkan Jenis Kelamin

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Sekda	1	-	1
2.	Staf Ahli Walikota	2	-	2
3.	Staf pada Staf Ahli Walikota	6	-	6
4.	Asisten	3	-	3
5.	Bagian Adm. Pemerintahan	7	6	13
6.	Bagian Hukum	6	6	12

7.	Bagian Organisasi	3	5	8
8.	Bagian Adm. Ekbang	3	4	7
9.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	5	4	9
10.	Bagian Adm. Umum	21	7	28
11.	Bagian Adm. Humas PP	8	6	14
Jumlah		65	38	103

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa distribusi ASN perempuan relatif merata, meskipun di beberapa unit kerja jumlah ASN perempuan lebih banyak dari ASN laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap kemampuan ASN perempuan sama besarnya dengan kepercayaan terhadap kemampuan ASN laki-laki.

Sementara itu dilihat dari sisi jumlah, kualifikasi berdasarkan jenjang pendidikan, dan ruang golongan, sumber daya aparatur yang ada sudah cukup memadai. Berikut disajikan profil sumber daya aparatur Sekretariat Daerah berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

Tabel 2.2 Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	%
1.	SD	-	0
2.	SLTP	4	3,88
3.	SLTA	30	29,13
4.	Sarjana Muda/Diploma	7	6,8
5.	S1	49	47,57
6.	S2	13	12,62
J u m l a h		103	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN dengan jenjang pendidikan S1 merupakan jumlah terbanyak yakni 47,57%, disusul jenjang pendidikan SLTA sebanyak 29,13%, dan jenjang pendidikan S2 sebanyak 12,62%. Keinginan ASN untuk meningkatkan jenjang pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menunjukkan trend yang meningkat. Saat ini ASN yang berpendidikan S2 sebanyak 12,62%, dan akan semakin bertambah karena beberapa ASN sedang menempuh pendidikan S2 baik dengan status tugas belajar maupun ijin belajar.

Sementara itu berdasarkan pangkat dan golongannya, jumlah dan persentasenya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Jumlah ASN Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)	%
1.	IV	17	16,5
2.	III	51	49,5
3.	II	31	30,2
4.	I	4	3,8
Jumlah		103	100,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN dengan pangkat/golongan terendah yaitu Golongan I sudah sangat kecil proporsinya. Hal ini tentu saja berkaitan dengan jenjang pendidikan yang dimiliki, dimana jenjang pendidikan SD dan SLTP juga proporsinya sangat kecil. Kecilnya jumlah ASN yang Bergolongan I juga terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam penerimaan CASN, yang dalam beberapa tahun terakhir tidak lagi membuka formasi untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik harus diikuti dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualifikasi.

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan para ASN dan pejabat struktural, Sekretaris Daerah selaku pimpinan OPD selalu mendorong kepada ASN maupun pejabat struktural untuk meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis maupun diklat kepemimpinan. Kebijakan peningkatan kemampuan pejabat struktural melalui diklat kepemimpinan bagi pejabat struktural dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4. Jumlah Formasi Jabatan Struktural dan Pejabat Struktural yang Telah Sesuai Diklat Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

No.	Jabatan Struktural	Jumlah Formasi	Pejabat Struktural Telah Sesuai Pendidikan Struktural	
			Orang	%
1.	Eselon II	7	4	57,14%
2.	Eselon III	7	6	85,71%
3.	Eselon IV	21	19	90,48%

2.2.2. Sumber Daya Dana

Selain sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sumber daya dana merupakan aspek penting lainnya dalam memberhasilkan tujuan organisasi. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan alokasi anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2011 – 2016

TAHUN	BELANJA LANGSUNG (Juta Rp.)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Juta Rp.)	JUMLAH (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
2011	9.396.645.200	2.835.907.000	12.232.552.200	
2012	20.197.747.350	9.491.004.000	29.688.751.350	142,7%
2013	22.846.064.100	17.396.647.800	40.242.711.900	35,55%
2014	25.862.616.150	17.811.062.000	43.673.678.150	8,53%
2015	31.050.355.150	14.220.020.491	45.270.375.641	3,66%
2016	32.530.651.979	11.410.109.791	43.940.761.770	-2,94%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 2,94%. Fluktuasi alokasi anggaran tersebut tentunya sesuai dengan kondisi dan dinamika yang terjadi pada saat itu, terutama disesuaikan dengan realitas kebutuhan dan prioritas program dan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

2.2.3. Sumber Daya Teknologi

Seiring perkembangan zaman, teknologi di bidang informasi dan komunikasi sangat berperan dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan efisien dan efektif. Adopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung kinerja organisasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan dan manfaat. Pertimbangan aspek kebutuhan didasarkan atas analisis bahwa teknologi tersebut mutlak diperlukan karena organisasi akan kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya jika tidak menggunakan teknologi tersebut. Sementara itu aspek manfaat didasarkan

atas analisis bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut organisasi akan menerima manfaat yang signifikan dibandingkan jika tidak menggunakan teknologi tersebut, seperti penyelesaian pekerjaan jauh lebih cepat, akurasi hasil pekerjaan jauh lebih baik, biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi petugas yang menggunakannya (prinsip ergonomis).

Pengkajian pemanfaatan sumber daya teknologi secara terus menerus dilakukan sehingga organisasi dapat terus berkembang menjadi organisasi modern, efisien, dan berkinerja tinggi. Sumber daya teknologi dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah saat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Sumber Daya Teknologi yang digunakan
Pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi**

No.	Jenis Teknologi	Satuan	Jumlah
1.	Komputer :		
	a. Desktop	Unit	25
	b. Laptop	Unit	49
2.	Aplikasi	Unit	4

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Sebagai organisasi unsur staf yang memiliki tugas dalam perumusan kebijakan dan mengoordinir OPD-OPD, berbagai produk kebijakan teknis telah dihasilkan Sekretariat Daerah. Berbagai produk-produk kebijakan teknis yang kemudian ditetapkan menjadi kebijakan pemerintah daerah diantaranya adalah kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pedoman pengelolaan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah. Sementara itu dalam menjalankan tugas sebagai koordinator OPD, pelayanan yang dilaksanakan meliputi mengoordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan, publik, pembangunan daerah, kemasyarakatan, dan pelayanan kedinasan walikota dan wakil walikota, yang kesemuanya telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah pada masa-masa yang akan terus ditingkatkan, terutama dalam mempersiapkan rancangan-rancangan kebijakan Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang lebih berkualitas sesuai kebutuhan dan dinamika yang terus berkembang, terutama rancangan kebijakan yang lebih mendorong terciptanya akuntabilitas di jajaran OPD, koordinasi yang lebih meningkat antar-OPD, serta peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur.

TABEL. C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Ketersediaan pangan bagi keluarga miskin.	-	-	-	50%	100%	100%	100%	100%	40,69%	100%	100%	100%	100%	81,38%	100%	100%	100%	100%
2	Tercapainya sistem, pelaporan administrasi pembangunan dengan tersedianya buku standar harga.	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Penataan dan penyelenggaraan LPSE	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2. Bagian Hukum dan Organisasi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penetapan Perda RTRW Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%
2	Penetapan Perda IPAL Komunal	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Jumlah SOP yang ditetapkan	-	-	-	40%	50%	60%	70%	80%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	143%	125%
4	Jumlah Perda yang ditetapkan	-	-	-	50%	60%	80%	90%	100%	18%	18%	18%	18%	18%	36%	30%	22%	20%	18%
5	Meningkatnya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan teori peraturan	-	-	-	40%	50%	75%	90%	100%	18%	18%	18%	18%	18%	44%	35%	24%	20%	18%
6	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan peraturan /UU	-	-	-	40%	50%	75%	90%	100%	18%	18%	18%	18%	18%	44%	35%	24%	20%	18%
7	Jumlah Perwa/aturan dan peraturan lainnya yang ditetapkan	-	-	-	50%	60%	80%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	167%	125%	111%	100%
8	Tersedianya draft peraturan daerah dan peraturan walikota	-	-	-	40%	50%	75%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	250%	200%	133%	111%	100%

3. Bagian Administrasi Pemerintahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Terjalannya hubungan dengan baik antar Walikota se-Indonesia	-	-	-	100	100	100	100	100	95	95	100	100	98,64	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	98,64%
2	Terjalannya Kerjasama dengan Pemerintah Kota Seluruh Indonesia / Jumlah Kerjasama antar daerah	-	-	-	100	100	100	100	100	44	44	48,84	87	92,96	44,00%	44,00%	48,84%	87,00%	92,96%
3	Terpilihnya kecamatan terbaik tingkat kota Tebing Tinggi	-	-	-	100	100	100	100	100	84	84	70,52	86	84,27	84,00%	84,00%	70,52%	86,00%	84,27%
4	Terlaksananya upacara hari otonomi daerah dengan tertib	-	-	-	100	100	100	100	100	93	93	46	64	75,04	93,00%	93,00%	46,00%	64,00%	75,04%
5	Tersedianya buku kecamatan dalam angka Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100	100	100	100	100	85	85	87,41	97	-	85,00%	85,00%	87,41%	97,00%	0,00%

6	Jumlah Buku LPPD dan Suplemen	-	-	-	100	100	100	100	100	73	73	84,65	97	88,60	73,00%	73,00%	84,65%	97,00%	88,60%
7	Menambah pengetahuan dan pemahaman aparatur kecamatan	-	-	-	100	100	100	100	100	92	92	65,74	100	100	92,00%	92,00%	65,74%	100,00%	100,00%
8	Jumlah pertemuan/ konsultasi dengan pemerintah provinsi	-	-	-															
9	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	-	-	-															
10	Meningkatnya kinerja Camat dalam bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	99,82	-	-	-	-	99,82%
11	Menambah pengetahuan tentang peraturan pengadaan tanah bagi aparatur	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	94,97	-	-	-	-	94,97%
12	Terpenuhinya standar sarana dan prasarana aparatur	-	-	-	-	100	100	-	100	-	97,93	97,93	-	95,43	-	97,93%	97,93%	-	95,43%
13	Tersedianya buku/informasi mengenai Unsur Alami Rupa Bumi Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	87	-	-	-	-	87,00%	-

14	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Rambutan	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85,00%	-
15	Tersusunnya Perwa Pelimpahan Kewenangan Walikota kepada Camat	-	-	-	-	100	-	-	-	-	7	7	-	-	-	7,00%	-	-	-
16	Tersedianya Jumlah Tapal Batas Wilayah	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-
17	Tersedianya buku Administrasi Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Tebing Tinggi	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Terpenuhinya laporan-laporan di Bagian Adm. Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%
19	Tersusunnya buku memori serah terima jabatan Walikota/Wakil Walikota 2011-2016	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00%
20	Tertib administrasi di Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Bagian Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Realisasi bantuan sosial terhadap proposal yang layak bantu				50	60	70	75	80	45	137	0	0	0	90	228,33	0	0	0
2.	Realisasi bantuan keagamaan terhadap proposal yang layak bantu				60	65	70	75	80	61	74	0	5	47	101,67	113,85	0	6,67	58,75

5. Bagian Administrasi Umum

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2012	2013	2014	2015	2016	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Surat Masuk	-	-	-	2257	2280	2280	2280	2280	1337	1375	1392	1115	1354	59,24%	60,31%	61,05%	48,90%	59,39%
2	Jumlah Surat Keluar	-	-	-	1858	1880	1880	1880	1880	1309	1400	1423	6492	6361	70,45%	74,47%	75,69%	345,32%	338,35%

6. Bagian Administrasi Humas, Pimpinan dan Protokol

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Publikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang strategis melalui: - leaflet - kalender - majalah																		
					5500	6000	6500	7000	7500	3000	3000	0	0	2000	54,55%	50%	0%	0%	27%
					1500	2000	2500	3000	3500	1000	1000	1000	1000	1000	66,67%	50,00%	40,00%	33,33%	28,57%
					12000	18000	24000	30000	35000	6000	6000	6000	6600	6600	50,00%	33,33%	25,00%	22,00%	18,86%

TABEL C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi perkantoran																	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	-	1.000.000	-	-	-	-	950.000	-	-	-	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00		
Pelayanan operasional LPSE	-	-	291.478.000	326.500.000	584.458.200	-	-	160.097.935	257.469.000	461.554.999	0,00	0,00	54,93	78,86	78,97		
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	49.683.000	19.491.100	2.840.000	124.874.100	-	7.577.350	15.680.000	2.840.000	122.424.100	0,00	15,25	80,45	100,00	98,04		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	29.661.500	106.809.400	104.866.000	69.500.000	-	-	101.935.500	104.866.000	68.600.000	0,00	0,00	95,44	100,00	98,71		
Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan																	
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	-	18.277.900	15.893.000	13.872.500	20.008.000	-	11.232.026	9.399.500	8.258.000	11.475.000	0,00	61,45	59,14	59,53	57,35		
Koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan	-	32.578.300	96.806.000	139.400.000	248.896.000	-	22.359.839	61.289.000	78.212.510	201.320.000	0,00	68,63	63,31	56,11	80,89		
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan Daerah																	

Operasi pasar murah rakyat	484.589.700	-	-	-	-	483.917.700		0			99,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
Penyusunan standar satuan harga	-	49.038.900	53.008.400	46.519.000	58.653.000	-	35.590.272	31.051.000	34.714.200	55.819.000	0,00	72,58	58,58	74,62	95,17		
Pembinaan dan Operasional Raskin	554.483.450	455.389.600	289.244.250	156.289.050	114.785.450	225.627.650	134.017.301	45.961.000	52.907.170	78.465.690	40,69	29,43	15,89	33,85	68,36		
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi																	
Pelaksanaan PRSU	166.446.000	-	-	-	-	159.187.308	-	-	-	-	95,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
Persiapan pembentukan lembaga pengadaan secara elektronik (LPSE)	67.285.000	-	-	-	-	31.397.000	-	-	-	-	46,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan																	
Monitoring dan Pengendalian bahan kebutuhan pokok dan Barang Strategis lainnya	12.270.000	21.408.400	17.673.000	-	-	7.505.000	16.519.303	13.341.000	-	-	61,17	77,16	75,49	0,00	0,00		
Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan	21.070.000	44.326.800	77.310.400	64.230.000	63.990.000	11.504.000	39.309.748	56.128.000	51.884.200	51.947.000	54,60	88,68	72,60	80,78	81,18		
Koordinasi dan Pengendalian Inflasi Daerah	-	16.885.500	44.630.800	38.322.000	71.825.000	-	3.960.750	31.272.000	36.585.600	38.765.000	0,00	23,46	70,07	95,47	53,97		

2. Bagian Hukum

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Hukum Kepada Pejabat/Aparatur Dilingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi	269.040.000	324.600.000	348.780.000	350.000.000	350.000.000	324.600.000	348.780.000	338.520.000	315.000.000	304.637.000	121	107	97	90	87	39.290.000	(38.098.000)
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan	93.780.000	132.000.000	213.300.000	300.000.000	300.000.000	132.000.000	213.300.000	200.640.000	210.123.000	235.683.000	141	162	94	70	79	177.555.000	42.708.000
Publikasi Peraturan Perundang-undangan	36.040.000	40.000.000	21.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	21.000.000	24.000.000	24.000.000	46.000.000	111	53	114	60	115	990.000	20.250.000
Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	-	100	100	100	110	12.500.000	5.000.000
Sosialisasi Penyuluhan Hukum	98.880.000	90.360.000	97.560.000	100.000.000	100.000.000	90.360.000	97.560.000	97.840.000	155.400.000	154.600.000	91	108	100	155	155	7.510.000	58.840.000
Penataan Susunan Organisasi Perangkat Daerah	30.000.000	32.000.000	20.000.000	40.000.000	40.000.000	32.000.000	20.000.000	25.040.000	26.900.000	30.420.000	107	63	125	67	76	8.500.000	7.420.000
Koordinasi Penyusunan Pedoman Pelayanan Publik	-	-	-	-	-	30.000.000	-	-	20.890.000	17.660.000	-	-	-	-	-	-	10.160.000

3. Bagian Administrasi Pemerintahan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	-	58.000.000	-	29.550.000	63.750.000	-	56.800.000	-	28.200.000	60.950.000	-	0,98	-	0,95	0,96	30.260.000	29.190.000
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan PATEN	-	-	-	33.550.000	-	-	-	-	33.490.000	-	-	-	-	1,00	-	6.710.000	6.698.000
Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah	-	-	-	22.310.600	-	-	-	-	21.187.800	-	-	-	-	0,95	-	4.462.120	4.237.560
Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan PATEN	-	-	-	-	71.726.000	-	-	-	-	68.246.000	-	-	-	-	0,95	14.345.200	13.649.200
Rapat Teknis Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan	28.410.000	32.930.000	21.950.000	11.650.000	0,00	26.253.160	21.648.890	21.950.000	11.650.000	0,00	0,92	0,66	0,00	0,00	0,00	18.988.000	16.300.410
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	-	4.992.000	5.000.000	-	-	-	4.992.000	2.570.000	-	-	-	0,00	0,51	1.998.400	1.512.400
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah																	
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	28.500.000	35.000.000	58.500.000	60.000.000	-	28.500.000	35.000.000	57.707.100	54.890.300	-	0,00	0,00	0,99	0,91	36.400.000	35.219.480
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah																	
Fasilitasi / Pembentukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga	149.980.000	46.000.000	54.000.000	51.820.000	74.130.000	85.975.200	22.467.100	47.028.800	48.169.500	63.152.000	0,57	0,49	0,87	0,93	0,85	75.186.000	53.358.520

Penataan Daerah Otonomi Baru																	
Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
Perlombaan Kecamatan	70.000.000	88.835.000	77.405.000	72.345.000	72.645.000	58.842.000	62.650.000	66.675.600	60.965.000	66.765.500	0,84	0,71	0,86	0,84	0,92	76.246.000	63.179.620
Hari Otonomi Daerah	7.640.000	17.850.000	14.770.000	13.140.000	13.200.000	7.080.720	8.255.000	9.440.000	9.860.000	13.190.000	0,93	0,46	0,64	0,75	1,00	13.320.000	9.565.144
Penyusunan Buku Kecamatan Dalam Angka	65.000.000	72.325.000	50.040.000	30.900.000	-	55.524.970	63.170.000	48.540.000	0,00	-	0,85	0,87	0,97	0,00	-	43.653.000	33.446.994
Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota ttg Pelimpahan sebagian Kewenangan kepada Camat	-	34.285.000	-	-	-	-	3.112.120	-	-	-	-	0,09	-	-	-	6.857.000	622.424
Pendataan dan Inventarisasi Unsur Alam Rupabumi	63.500.000	-	42.190.000	-	-	0,00	-	36.586.465	-	-	0,00	-	0,87	-	-	21.138.000	7.317.293
Penyusunan LPPD dan Suplemen	69.980.000	80.000.000	71.380.000	74.930.000	90.105.000	50.887.200	67.723.600	68.980.300	66.386.500	86.895.000	0,73	0,85	0,97	0,89	0,96	77.279.000	68.174.520
Pembentukan dan Pelaksanaan PATEN di Kota Tebing Tinggi	-	-	158.140.000	-	-	-	-	134.605.000	-	-	-	-	0,85	-	-	31.628.000	26.921.000
Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Walikota/Wakil Walikota Tebing Tinggi 2016	-	-	-	-	48.550.000	-	-	-	-	42.360.000	-	-	-	-	0,87	9.710.000	8.472.000
Fasilitasi Penanganan Permasalahan Masyarakat pada Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Pemerintahan	-	-	-	-	205.894.000	-	-	-	-	185.077.246	-	-	-	-	0,90	41.178.800	37.015.449

4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	40.000.000	0	0	0	0	36.675.000	0	0	0	0	91,69	0	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Kegiatan Nikah Massal	0	185.150.000	0	0	0	0	139.700.000	0	0	0	0,00	75,45	0	0	0	0	0
Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW	201.050.000	312.951.000	282.086.500	285.086.500	290.586.500	115.900.000	275.423.000	280.014.500	261.602.500	217.748.500	57,65	88,01	99,27	91,76	74,93	112,20	128,99
Pelaksanaan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW	199.710.000	263.601.800	268.300.000	271.800.000	264.300.000	196.109.000	244.833.200	266.895.902	257.308.000	254.989.000	98,20	92,88	99,48	94,67	96,48	108,08	107,34
Pelaksanaan Bulan Suci Ramadhan	728.125.000	1.011.695.000	967.405.000	965.407.000	862.155.000	661.267.200	1.008.901.000	892.601.000	874.798.500	847.807.500	90,82	99,72	92,27	90,61	98,34	105,92	108,99
Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri	36.300.000	23.550.000	28.550.000	26.050.000	30.700.000	33.236.000	23.530.000	28.545.000	26.050.000	30.700.000	91,56	99,92	99,98	100,00	100,00	98,8	100,3
Pelaksanaan Sholat Idul Fitri	41.910.000	42.300.000	47.300.000	47.300.000	47.300.000	39.900.000	41.300.000	47.300.000	46.300.000	46.300.000	95,20	97,64	100,00	97,89	97,89	103,19	103,98
Pelaksanaan Takbiran Idul Adha	33.000.000	22.750.000	22.750.000	22.750.000	20.650.000	33.000.000	22.725.000	0	22.650.000	20.650.000	100,00	99,89	0,00	99,56	100,00	89,93	40,01
Pelaksanaan Sholat Idul Adha	41.470.000	70.110.000	62.610.000	62.610.000	42.160.000	41.145.000	51.010.000	62.610.000	41.810.000	42.160.000	99,22	72,76	100,00	66,78	100,00	106,43	103,58
Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemberangkatan Jamaah Calon Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	277.090.000	273.135.000	483.564.000	483.564.000	395.995.000	185.832.000	203.315.000	415.430.000	372.604.000	389.453.000	67,07	74,44	85,91	77,05	98,35	114,38	126,99

Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemulangan/Kembali Jamaah Jemaah Haji Asal Kota Tebing Tinggi	142.280.000	125.505.000	127.505.000	127.505.000	117.505.000	129.863.000	114.331.000	124.057.000	116.724.000	108.465.000	91,27	91,10	97,30	91,54	92,31	95,49	95,89
Pelaksanaan Kuliah Agama/Bimbingan Rohani di Lingkungan Pemko Tebing Tinggi	92.480.000	382.360.000	472.160.000	232.960.000	530.600.000	87.440.000	335.280.000	382.320.000	226.620.000	500.380.000	94,55	87,69	80,97	97,28	94,30	203,51	194,39
Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ	955.930.000	1.185.362.000	1.095.200.000	785.500.000	865.300.000	901.950.000	1.161.181.368	1.057.391.000	770.828.000	821.422.000	94,35	97,96	96,55	98,13	94,93	99,57	99,82
Pelaksanaan Tablig Akbar dan Hafiah Alquran memeriahkan Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram	267.350.000	301.570.000	336.362.500	281.742.500	310.700.000	261.698.000	298.160.200	332.153.356	231.009.500	305.947.300	97,89	98,87	98,75	81,99	98,47	104,59	106,83
Pelaksanaan ibadah Qurban Pemko Tebing Tinggi	16.400.000	0	0	0	0	16.400.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Quran	34.975.000	47.750.000	47.944.000	47.944.000	47.944.000	30.275.000	33.450.000	47.994.000	47.944.000	47.944.000	86,56	70,05	100,10	100,00	100,00	109,23	113,47
Pelaksanaan Halal Bi Halal Pemko Tebing Tinggi dan PNS Beserta Calon Jemaah Haji dan PNS	113.720.000	122.770.000	164.009.000	123.009.000	121.509.000	112.070.000	122.506.000	163.968.500	122.195.000	121.309.000	98,55	99,78	99,98	99,34	99,84	103,83	104,24
Pelaksanaan Ramah Tamah Pemerintah Kota Tebing Tinggi dengan Alim Ulama se - Kota Tebing Tinggi	137.480.000	0	0	0	0	129.660.000	0	0	0	0	94,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pelaksanaan Gemar Mengaji Ba'da Magrib	513.810.000	758.254.000	310.000.000	663.454.000	853.410.000	449.350.000	625.004.000	290.756.000	633.845.000	836.810.000	87,45	82,43	93,79	95,54	98,05	132,78	133,93
Pelaksanaan Pelatihan/Pembinaan Bilal Mayit	46.815.000	0	0	0	0	45.315.000	0	0	0	0	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Iman dan Khatib se - Kota Tebing Tinggi	31.885.000	32.385.000	0	0	0	29.185.000	32.085.000	0	0	0	91,53	99,07	0,00	0,00	0,00	25,39	27,48
Lomba Azan se - Kota Tebing Tinggi	36.585.000	0	0	0	0	36.585.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Lomba Sholat Jenazah Bagi Siswa SMP dan SMA Se - Kota Tebing Tinggi	0	72.140.000	0	0	0	0	72.123.400	0	0	0	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0
Lomba Membaca Ayat - ayat Pendek Bagi Siswa SD dan SMP se - Kota Tebing Tinggi	0	49.630.000	0	0	0	0	49.630.000	0	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Lomba Baca Yasin, Tahlil, Takhtim dan Doa Se - Kota Tebing Tinggi	0	162.700.000	0	0	0	0	153.300.000	0	0	0	0,00	94,22	0,00	0,00	0,00	0	0
Festival Nasyid Kota Tebing Tinggi	295.400.000	333.000.000	411.800.000	398.600.000	603.950.000	269.163.000	332.743.000	411.800.000	398.600.000	596.950.000	91,12	99,92	100,00	100,00	98,84	121,18	123,48
Pelaksanaan Festival Seni Budaya Islam Barjanzi dan Marhaba Tingkat Kota Tebing Tinggi	0	0	0	172.320.000	172.320.000	0	0	0	157.870.000	164.120.000	0,00	0,00	0,00	91,61	95,24	25	25,99
Pelaksanaan Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional	0	0	0	335.000.000	342.000.000	0	0	0	278.600.000	294.486.000	0,00	0,00	0,00	83,16	86,11	25,52	26,43
Kegiatan Perayaan Natal Oikumene Masyarakat se - Kota Tebing Tinggi	0	271.555.000	627.454.000	278.600.000	57.600.000	0	270.527.000	607.326.000	278.600.000	56.600.000	0,00	99,62	96,79	100,00	98,26	74,03	72,67
Kegiatan Perayaan Natal PNS Kota Tebing Tinggi	0	0	245.450.000	57.600.000	57.600.000	0	0	245.450.000	57.600.000	56.600.000	0,00	0,00	100,00	100,00	98,26	30,87	30,43
Kegiatan BAKOR PAKEM	0	0		265.440.000	275.440.000	0	0		155.500.000	157.860.000	0,00	0,00	0,00	58,58	57,31	25,94	25,38

Perayaan Paskah Masyarakat Kota Tebing Tinggi	0	0	248.790.000	114.690.000	114.690.000	0	0	246.782.000	114.690.000	114.690.000	0,00	0,00	99,19	100,00	100,00	36,52	36,62
Pelaksanaan Kenduri Muharram, Zikir dan Khatam Alquran Akbar	0	0	63.800.000	248.790.000	0	0	0	62.800.000	223.246.000		0,00	0,00	98,43	89,73	0,00	97,49	88,87
Upacara Hari Kebangkitan Nasional	38.440.000	37.370.000	42.515.000	51.870.000	48.170.000	33.920.000	33.257.000	36.402.000	41.620.000	40.520.000	88,24	88,99	85,62	80,24	84,12	106,46	104,8
Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia	196.640.000	154.500.000	164.761.000	189.461.000	242.320.000	179.747.500	151.982.000	154.163.000	172.361.000	230.820.000	91,41	98,37	93,57	90,97	95,25	107,03	107,93
Upacara Hari Kesaktian Pancasila	28.312.000	30.560.000	32.135.500	33.695.500	35.610.000	28.180.000	30.547.000	32.122.500	31.195.500	35.610.000	99,53	99,96	99,96	92,58	100,00	105,91	106,21
Upacara Hari Pahlawan	64.600.000	42.780.000	60.320.000	60.320.000	57.420.000	40.580.000	42.757.000	59.807.000	43.320.000	42.920.000	62,82	99,95	99,15	71,82	74,75	100,6	104,19
Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli	502.940.000	679.280.000	681.070.500	684.320.500	880.520.500	474.112.490	590.347.200	532.047.000	634.323.500	867.567.000	94,27	86,91	78,12	92,69	98,53	116,12	117,66
Upacara Peringatan Hari KORPRI, Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi	35.460.000	34.560.000	36.240.000	35.190.000	35.190.000	35.360.000	34.547.000	36.227.000	35.190.000	35.190.000	99,72	99,96	99,96	100,00	100,00	99,86	99,93
Upacara Hari Peristiwa Berdarah	40.770.000	39.850.000	42.690.000	48.340.000	45.840.000	40.550.000	39.837.000	42.677.000	45.840.000	45.840.000	99,46	99,97	99,97	94,83	100,00	103,23	103,2

5. Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	520.000.000	678.400.000	-	-	-	519.449.000	607.799.000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	239.680.000	225.449.600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	846.400.000	749.260.000	-	1.079.400.000	-	611.296.229	659.270.576	-	810.639.932	-	0,72	0,88	0,00	0,75	0,00	535.012.000	416.241.347
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah	-	-	959.400.000	-	833.520.000	-	-	815.644.039	-	801.314.204	0,00	0,00	0,85	0,00	0,96	358.584.000	323.391.649
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	-	-	-	370.000.000	385.000.000	-	-	-	234.066.721	259.625.270	0,00	0,00	0,00	0,63	0,67	151.000.000	98.738.398
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	187.388.000	198.188.000	-	710.400.000	-	180.850.000	194.988.800	-	707.232.000	-	0,97	0,98	0,00	1,00	0,00	219.195.200	216.614.160
Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Peralatan Kebersihan Kantor	-	-	216.000.000	-	781.100.000	-	-	215.991.800	-	781.043.300	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	199.420.000	199.407.020
Penyediaan Alat Tulis Kantor	199.811.000	192.156.000	157.949.200	200.739.000	230.739.000	174.510.300	175.981.000	153.147.100	196.533.500	223.822.350	0,87	0,92	0,97	0,98	0,97	196.278.840	184.798.850
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	134.374.000	107.564.000	72.263.200	102.828.200	92.828.200	110.643.350	94.444.000	72.254.100	102.828.200	86.542.850	0,82	0,88	1,00	1,00	0,93	101.971.520	93.342.500
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	34.608.000	32.260.500	23.000.000	35.000.000	425.000.000	34.592.700	32.014.700	22.988.400	34.577.100	424.348.300	1,00	0,99	1,00	0,99	1,00	109.973.700	109.704.240
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000	10.000.000	-	-	-	-	9.970.600	-	-	-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000	1.994.120
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Negeri	1.030.000.000	1.120.000.000	930.000.000	1.100.000.000	1.450.000.000	1.023.164.720	1.047.105.498	928.932.604	1.016.366.341	1.317.157.219	0,99	0,93	1,00	0,92	0,91	1.126.000.000	1.066.545.276
Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah dan Wakil KDH	147.000.000	200.000.000	77.000.000	155.000.000	98.525.918	98.831.099	169.204.219	74.650.032	128.983.778	83.525.918	0,67	0,85	0,97	0,83	0,85	135.505.184	111.039.009
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Satuan Kerja	538.100.000	608.400.000	732.000.000	-	-	509.974.300	596.921.300	731.955.000	-	-	0,95	0,98	1,00	0,00	0,00	375.700.000	367.770.120
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	1.800.000.000	200.000.000	1.323.449.000	600.000.000	834.807.000	1.632.058.500	194.070.625	1.199.915.000	592.545.066	834.807.000	0,91	0,97	0,91	0,99	1,00	951.651.200	890.679.238
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	240.000.000	350.000.000	1.345.080.000	262.125.000	234.000.000	214.310.850	161.369.600	1.241.519.700	237.365.500	228.900.000	0,89	0,46	0,92	0,91	0,98	486.241.000	416.693.130
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas	197.500.000	107.375.000	119.401.000	176.300.000	493.750.000	107.730.000	90.967.000	115.497.500	164.679.000	435.065.000	0,55	0,85	0,97	0,93	0,88	218.865.200	182.787.700

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	670.035.000	241.500.000	76.760.000	9.107.000	7.030.000	565.827.000	230.430.000	74.999.700	8.975.000	7.030.000	0,84	0,95	0,98	0,99	1,00	200.886.400	177.452.340
Pengadaan Mebeleur	112.000.000	95.350.000	339.765.000	104.750.000	28.750.000	96.955.000	69.640.000	336.784.500	104.705.000	28.750.000	0,87	0,73	0,99	1,00	1,00	136.123.000	127.366.900
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional KDH dan Wakil KDH	220.962.000	-	-	-	-	193.903.700	-	-	-	-	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.192.400	38.780.740
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	1.500.000	35.000.000	149.000.000	181.000.000	-	-	17.669.000	80.325.050	180.894.400	0,00	0,00	0,50	0,54	1,00	73.300.000	55.777.690
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Rumah Jabatan / Dinas	83.500.000	108.100.000	82.600.000	87.600.000	47.824.550	34.749.500	38.104.011	39.019.683	40.217.174	45.988.394	0,42	0,35	0,47	0,46	0,96	81.924.910	39.615.752
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	945.982.500	1.383.910.000	936.435.000	1.489.670.000	615.480.000	722.818.350	1.361.101.750	934.656.000	1.465.027.700	605.858.000	0,76	0,98	1,00	0,98	0,98	1.074.295.500	1.017.892.360
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	275.000.000	230.000.000	718.300.000	549.266.000	660.751.500	164.752.500	214.597.750	415.604.300	516.231.700	660.714.000	0,60	0,93	0,58	0,94	1,00	486.663.500	394.380.050
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	215.200.000	227.760.000	130.160.000	141.875.000	145.900.000	121.492.500	120.592.000	100.502.500	103.737.000	142.696.000	0,56	0,53	0,77	0,73	0,98	172.179.000	117.804.000
Pemeliharaan Rutin Mebeleur	8.100.000	30.000.000	58.000.000	85.000.000	73.920.000	8.095.000	14.267.000	49.349.000	63.330.700	69.317.000	1,00	0,48	0,85	0,75	0,94	51.004.000	40.871.740
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	275.500.000	345.500.000	304.000.000	1.197.600.000	551.764.833	212.024.871	222.257.771	255.582.678	1.137.590.550	508.990.833	0,77	0,64	0,84	0,95	0,92	534.872.967	467.289.341
Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	-	940.330.000	-	-	-	-	932.813.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	188.066.000	186.562.600
Pemeliharaan Taman	130.000.000	123.000.000	165.750.000	85.000.000	75.000.000	119.170.000	111.611.000	154.496.000	82.034.000	74.832.000	0,92	0,91	0,93	0,97	1,00	115.750.000	108.428.600
Program Peningkatan Disiplin Aparatur																	
Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	-	82.500.000	-	-	-	-	81.750.000	-	-	-	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	16.500.000	16.350.000
Pengadaan Pakaian Dinas KDH dan Wakil KDH Beserta Perlengkapannya	45.800.000	47.200.000	-	-	-	38.600.000	47.000.000	-	-	-	0,84	1,00	0,00	0,00	0,00	18.600.000	17.120.000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	47.200.000	47.200.000	56.400.000	-	-	47.000.000	47.000.000	34.900.000	0,00	0,00	1,00	1,00	0,62	30.160.000	25.780.000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	28.000.000	24.850.000	-	44.700.000	145.160.000	17.700.000	24.577.000	-	44.430.000	140.380.000	0,63	0,99	0,00	0,99	0,97	48.542.000	45.417.400
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-	5.640.000	-	-	-	-	1.594.700	-	-	-	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	1.128.000	318.940
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	-	349.100.000	-	-	-	-	320.219.600	-	-	-	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	69.820.000	64.043.920
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																	
Pelatihan Etika Pelayanan	-	-	-	-	92.400.000	-	-	-	-	92.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	18.480.000	18.480.000

Penyediaan Jasa Jaminan Sosial	-	5.640.000	21.114.000	61.538.400	69.542.928	-	1.594.700	-	48.675.000	68.756.654	0,00	0,28	0,00	0,79	0,99	31.567.066	23.805.271
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan																	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	6.379.600	6.379.600	-	-	-	6.313.600	5.427.300	0,00	0,00	0,00	0,99	0,85	2.551.840	2.348.180
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah																	
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri	1.048.900.000	969.900.000	389.535.000	843.400.000	640.000.000	513.026.600	634.261.450	292.464.532	670.683.303	535.713.200	0,49	0,65	0,75	0,80	0,84	778.347.000	529.229.817
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	670.000.000	530.000.000	513.000.000	980.000.000	735.000.000	329.462.635	328.821.200	455.728.380	451.409.063	529.619.486	0,49	0,62	0,89	0,46	0,72	685.600.000	419.008.153
Belanja Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	550.000.000	634.000.000	510.000.000	763.000.000	656.000.000	550.000.000	594.000.000	462.000.000	752.187.500	651.000.000	1,00	0,94	0,91	0,99	0,99	622.600.000	601.837.500
Penerimaan Kunjungan Tamu-tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial	484.125.000	361.250.000	564.125.000	865.259.000	853.250.000	355.569.000	251.635.000	546.243.600	763.762.000	622.747.500	0,73	0,70	0,97	0,88	0,73	625.601.800	507.991.420
Kegiatan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	299.850.000	383.050.000	371.650.000	761.000.000	-	127.705.000	361.913.000	359.339.500	488.458.000	-	0,43	0,94	0,97	0,64	0,00	363.110.000	267.483.100
Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat	-	-	-	-	748.850.000	-	-	-	-	433.656.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	149.770.000	86.731.280
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	125.000.000	-	-	-	-	124.700.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	25.000.000	24.940.000
Program Hibah Barang Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur																	
Hibah Barang Untuk Kajari	-	-	-	-	89.205.500	-	-	-	-	89.205.500	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17.841.100	17.841.100
Hibah Barang Untuk Koramil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Hibah Barang Untuk MUI	-	-	-	-	200.340.000	-	-	-	-	200.340.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	40.068.000	40.068.000
Hibah Barang Untuk Sub Denpom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Hibah Barang Untuk Pengadilan Negeri	-	-	-	-	323.660.000	-	-	-	-	323.660.000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	64.732.000	64.732.000
Hibah Barang Untuk BNNK	-	-	-	-	200.000.000	-	-	-	-	174.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	40.000.000	34.900.000
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	4.791.000	-	-	-	-	4.567.400	-	-	-	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	958.200	913.480
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	-	120.900.000	-	-	-	-	65.698.075	-	-	-	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	24.180.000	13.139.615
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	-	200.000.000	-	-	-	-	171.544.250	-	-	-	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	40.000.000	34.308.850
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	-	80.450.000	-	-	-	-	58.143.185	-	-	-	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	16.090.000	11.628.637
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	-	150.000.000	-	-	-	-	126.076.000	-	-	-	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	30.000.000	25.215.200
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	-	82.580.000	-	-	-	-	52.023.400	-	-	-	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	16.516.000	10.404.680
Penyusunan/ Sosialisasi Paket Reguler Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	98.000.000	-	-	-	-	52.400.000	-	-	-	0,00	0,53	0,00	0,00	0,00	19.600.000	10.480.000
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Reguler Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	-	178.200.000	-	-	-	-	23.881.900	-	-	-	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	35.640.000	4.776.380
Penyediaan Peralatan Hardware Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah	-	153.580.000	-	-	-	-	149.275.000	-	-	-	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	30.716.000	29.855.000
Penatausahaan Keuangan Daerah di BUD	-	118.150.000	-	-	-	-	97.667.500	-	-	-	0,00	0,83	0,00	0,00	0,00	23.630.000	19.533.500
Penatausahaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi Simda	-	609.350.000	-	-	-	-	524.809.000	-	-	-	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	121.870.000	104.961.800
Penyusunan Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000	-
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH																	
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	-	14.200.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	2.840.000	400.000

6. Bagian Administrasi Humas Pimpinan dan Protokol

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan																	
Pelayanan pengembangan kerjasama penyelenggaraan keprotokolan	23.000.000	12.000.000	84.000.000	89.000.000	99.000.000	23.000.000	12.000.000	19.000.000	15.500.000	20.000.000	100,00%	100,00%	22,62%	17,42%	20,20%		
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa																	
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	636.100.000	1.073.100.000	1.242.000.000	1.325.000.000	1.385.000.000	636.100.000	1.039.731.000	837.915.500	1.481.907.797	1.751.002.859	100,00%	96,89%	67,47%	111,84%	126,43%		
Kerjasama Informasi dengan Mass Media																	
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	361.200.000	576.200.000	650.000.000	700.000.000	750.000.000	361.200.000	574.588.000	574.588.000	682.458.908	781.600.000	100,00%	99,72%	88,40%	97,49%	104,21%		
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	336.240.000	533.314.000	1.025.000.000	1.135.000.000	1.295.000.000	336.240.000	533.314.000	940.721.000	740.777.751	832.317.200	100,00%	100,00%	91,78%	65,27%	64,27%		
Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi dan Komunikasi Masyarakat	-	246.325.000	670.000.000	810.000.000	955.000.000	102.335.000	102.335.000	102.335.000	123.166.000	166.117.100		41,54%	15,27%	15,21%	17,39%		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Sebagai organisasi pembelajar (*the learner organization*) yang tanggap terhadap tuntutan perkembangan yang makin dinamis, semua organisasi pemerintah tak terkecuali Sekretariat Daerah menghadapi tantangan yang makin serius. Tantangan yang dihadapi terkait pengembangan pelayanan OPD secara deskriptif dijelaskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) mendorong pemerintah untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada semua tingkatan pemerintahan, termasuk semua lembaga dan organisasi pemerintah. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Mengingat reformasi birokrasi merupakan sebuah tujuan, keberhasilan reformasi birokrasi dapat dilihat dari keberhasilan pencapaian indikator reformasi birokrasi, yaitu :

- tidak ada korupsi
- tidak ada pelanggaran/sanksi;
- pengelolaan keuangan baik;
- semua program selesai dengan baik;
- semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;

- komunikasi dengan publik baik;
- penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
- penerapan *reward* dan *punishment* secara konsisten dan berkelanjutan;
- hasil pembangunan nyata (pertumbuhan, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat).

Dengan berlandaskan atas tujuan dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana telah disebutkan di atas, pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah dikonstruksi menjadi sebuah organisasi yang akan proaktif melaksanakan agenda reformasi birokrasi dengan berlandaskan atas indikator-indikator keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi yang ada. Hal ini menjadi tantangan luar biasa yang harus dihadapi Sekretariat Daerah, mengingat kondisi internal organisasi masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan klasik dan tradisional, seperti kompetensi sumber daya aparatur, keterbatasan anggaran, sistem penggajian yang belum berorientasi remunerasi, serta lingkungan strategis lain yang belum mendukung dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi.

2. Perubahan Peraturan dan Perundang-undangan yang makin dinamis

Perkembangan yang demikian pesat dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan, menciptakan banyak perubahan. Perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis tersebut berimplikasi semakin banyaknya peraturan dan perundang-perundangan yang diterbitkan, baik peraturan perundangan baru maupun peraturan perundangan sebagai perubahan atau penyempurnaan terhadap peraturan perundangan sebelumnya. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak peraturan perundangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan atau kementerian yang dalam implementasinya belum sempat ditindaklanjuti atau bahkan belum dipahami sepenuhnya oleh daerah, namun sudah muncul peraturan baru atau peraturan perubahannya. Kondisi ini tentu saja menyebabkan kebingungan bagi aparatur di daerah, tidak saja secara teknis kesulitan dalam penerapannya, namun lebih dari itu dari aspek hukum dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Cepatnya perubahan peraturan perundangan yang berlaku tentu menjadi tantangan bagi organisasi di daerah, yakni bagaimana dapat mengakses berbagai peraturan tersebut dengan cepat, mempelajari dan memahami peraturan tersebut, mempersiapkan rancangan peraturan sebagai tindaklanjutnya, mendiseminasikan peraturan tersebut kepada *stake holder* yang terkait, serta mengimplementasikan

peraturan tersebut dengan baik. Dibutuhkan daya tanggap yang tinggi dari aparaturnya terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya agar dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

3. Partisipasi dan Sikap Kritis Masyarakat

Perubahan sistem politik pasca berakhirnya kekuasaan orde baru, menyebabkan begitu banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya berdampak terhadap perubahan dalam sistem pemerintahan tetapi juga berdampak terhadap perubahan dalam sistem sosial dan perilaku masyarakat. Era transparansi dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat untuk turut berperan menjadi bagian dari sistem bernegara yang *civil society*. Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di seluruh daerah dalam jumlah yang cukup banyak, yang dalam pelaksanaan fungsinya lebih berorientasi dalam melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, memberikan manfaat sangat positif untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Pemerintah maupun organisasi pemerintah menjadi lebih berhati-hati dan bertanggungjawab dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik, karena jika tidak, akan berhadapan dengan sikap kritis masyarakat. Demonstrasi atau unjuk rasa dari elemen-elemen masyarakat, baik mahasiswa, pelajar, organisasi profesi, asosiasi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya merupakan bentuk nyata dari aktualisasi sikap kritis masyarakat terhadap apa saja yang menurut mereka tidak sesuai dengan nilai atau keinginan mereka, yang suka dan tidak suka harus diperhatikan. Meskipun dalam era demokrasi hal-hal tersebut merupakan sebuah kewajaran, namun jika intensitas dan kualitas dampak negatif dari aksi-aksi sikap kritis masyarakat tersebut sudah melewati batas kewajaran, tentunya akan mengganggu kinerja pemerintahan. Kecenderungan semakin meningkatnya sikap kritis masyarakat tentunya menjadi tantangan bagi organisasi pemerintahan untuk :

1. menyelenggarakan organisasi publik yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas;
2. memberikan pelayanan publik yang prima dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*);
3. meniadakan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan organisasi publik;
4. mengutamakan objektivitas dan kepentingan masyarakat banyak dalam melahirkan kebijakan publik.

Meskipun sikap kritis masyarakat memiliki kecenderungan yang meningkat baik dari sisi kuantitas dan kualitasnya, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam aspek lain. Di bidang politik misalnya, dalam beberapa penyelenggaraan Pemilu Legislatif tingkat nasional dan daerah, tingkat partisipasi masyarakat dalam bentuk pemberian suara atau hak pilihnya, mengalami kecenderungan yang semakin menurun. Demikian pula halnya dalam Pemilu Kepala Daerah, baik Gubernur maupun Walikota, menunjukkan fenomena yang hampir sama dengan apa yang terjadi dalam proses Pemilu Legislatif, yakni jumlah masyarakat yang memberikan suara atau hak pilihnya semakin menurun. Sementara itu, dalam kegiatan gotong royong, saat ini semakin sulit menghadirkan masyarakat dalam bergotong-royong, meskipun gotong royong di lingkungan mereka sendiri. Padahal gotong royong merupakan budaya luhur nenek moyang Bangsa Indonesia yang sudah turun temurun diwariskan dan hidup di tengah-tengah masyarakat, namun saat ini semakin sulit dipertahankan karena adanya krisis jati diri individu-individu yang semakin mementingkan diri sendiri. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tentunya menjadi tantangan bagi organisasi pemerintah untuk bagaimana :

1. membangkitkan kembali partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan mendorong masyarakat agar secara aktif berinteraksi dengan lingkungan untuk terciptanya sistem sosial yang pluralis dan dinamis;
2. membangun kinerja organisasi yang baik untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pemerintah;
3. pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik yang strategis agar masyarakat turut serta berpartisipasi di dalamnya karena merasa menjadi bagian dalam pengambilan kebijakan tersebut.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Meskipun Sekretariat Daerah dalam rangka pengembangan pelayanan OPD menghadapi tantangan yang cukup besar, berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal, memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan OPD. Peluang-peluang yang dimiliki tersebut secara deskriptif dijelaskan sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa berdasarkan jenjang pendidikan, pangkat atau golongan ruang, serta pendidikan dan latihan yang dimiliki, kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Daerah telah cukup memadai.

Pentingnya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas, merupakan dasar pertimbangan pimpinan dalam menempuh kebijakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur. Kebijakan tersebut ditempuh dalam bentuk pengiriman tugas belajar ke jenjang S1 dan S2, pemberian ijin belajar S1 dan S2, pengiriman pejabat struktural untuk mengikuti Diklat Pim IV, III, dan II, serta pengiriman pejabat maupun ASN untuk mengikuti diklat teknis sesuai bidang kelimuan masing-masing.

Investasi terhadap peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang dilakukan selama ini, tentunya bermanfaat untuk menghadapi tuntutan kerja yang semakin berat di masa-masa mendatang. Dengan dukungan sumber daya aparatur yang berkualitas, organisasi telah siap menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi, terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dapat berubah setiap waktu.

2. Ketersediaan Peraturan Perundangan

Implikasi perubahan tata kelola pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang transparan, partisipatis, dan akuntabel adalah terbitnya berbagai peraturan dan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya bersifat mengatur dan menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah, baik dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri. Hampir semua aspek yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya. Ketersediaan berbagai peraturan perundangan tersebut tentu saja akan memudahkan organisasi pemerintah dan aparatur di dalamnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena :

- a. peraturan perundangan berfungsi sebagai payung hukum;
- b. sistem dan prosedur yang harus dilaksanakan sudah jelas;
- c. dapat membantu organisasi jika menghadapi kendala/masalah teknis

3. Penerapan E-Government

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat dalam tiga dasawarsa terakhir, mendorong semua orang, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis, organisasi swasta, dan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada untuk berbagai kepentingan sesuai kebutuhan masing-masing. Dalam dunia perbankan misalnya, untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan atau nasabah yang tidak terbatas waktu dan tempat, disediakan layanan *Automated Teller Machine* (ATM) - dalam Bahasa Indonesia ATM dikonotasikan menjadi Anjungan Tunai Mandiri. Melalui ATM seorang nasabah dapat melakukan transaksi perbankan

dimana saja (tidak harus datang ke "kantor bank") dan kapan saja (tidak mengenal jam kantor, bisa siang, malam atau hari libur). ATM mengizinkan nasabah bank untuk mengambil uang, melakukan pengecekan saldo rekening tabungan, mentransfer uang ke pihak lain, membayar tiket pesawat, dan melakukan berbagai pembayaran tagihan rutin, seperti rekening listrik, telepon, dan lainnya, sehingga nasabah tidak perlu dilayani seorang "teller" manusia. ATM sebagai sebuah perangkat elektronik yang dirancang untuk dapat melakukan berbagai layanan perbankan, merupakan manifestasi dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan perusahaan bank memberikan pelayanan prima kepada nasabah, sehingga dengan pelayanan tersebut akan membuat nasabah tidak berpaling ke bank lain sekaligus dapat menarik nasabah-nasabah lain untuk menjadi nasabah bank tersebut.

Keberhasilan penggunaan teknologi dan informasi dalam dunia bisnis, menjadi pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam satu dasawarsa terakhir berbagai perangkat dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien, efektif, berbasis transparansi dan akuntabel, telah mulai dilakukan. Dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, masyarakat memiliki akses yang luas, murah, dan cepat untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan publik dari Pemerintah. Proporsional dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai informasi dan layanan publik, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik juga dimanfaatkan Pemerintah untuk mendapatkan umpan balik (*feed back*) dalam rangka memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan atas pelayanan publik tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat. Berlandaskan kebutuhan dan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, pemerintah dan pemerintah daerah sedang membangun sebuah sistem pemerintahan yang berbasis elektronik (*e-government*) dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan. Berbagai bentuk dari pelaksanaan *e-government* tersebut sudah dapat dirasakan tidak saja antar pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat. Jika sebelumnya berbagai laporan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat harus disampaikan dalam bentuk tercetak dan lewat pos, maka melalui pengembangan *e-government* berbagai laporan tersebut dapat disampaikan secara elektronik melalui internet, yang tentu saja lebih cepat, murah, dan terjamin sampai tujuan. Demikian pula bagi masyarakat, untuk mendapatkan data atau berbagai informasi misalnya, masyarakat tidak perlu mendatangi kantor instansi pemerintah yang jaraknya bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer dari tempat tinggalnya. Melalui situs

jaringan (*web site*) yang sudah terkoneksi dalam sistem internet, masyarakat bisa mendapatkan data dan informasi tersebut dengan cepat, mudah, aman dan murah. Pengembangan *e-government* terus ditingkatkan pada bidang-bidang lain tidak semata dalam penyajian data dan informasi secara elektronik. Saat ini juga sudah dikembangkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik atau dikenal dengan *e-procurement*. Tujuan dari penerapan *e-procurement* adalah :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
- d. Mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Bagi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang merupakan bagian dari organisasi pemerintah, perwujudan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) tentu menjadi peluang dalam rangka pengembangan pelayanan kinerja OPD. Peluang yang diperoleh dari pelaksanaan *e-government* adalah :

- a. ketersediaan dan kemudahan dalam penyampaian informasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan *stake holder* lainnya;
- b. kuantitas masyarakat yang memberikan aspirasi, masukan, saran, dan informasi lainnya semakin meningkat, karena melalui media elektronik masyarakat tidak harus takut dalam menyampaikan aspirasi, masukan, saran, dan informasi lain;
- c. terdapat efisiensi dari segi biaya karena komunikasi dan penyampaian laporan dapat dilakukan secara elektronik;
- d. penggunaan berbagai aplikasi dalam sistem informasi meningkatkan akurasi, lebih cepat dalam pengerjaan, serta duplikasi data dapat diminimalisasi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Sekretariat Daerah Kota adalah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang meliputi dinas daerah, badan daerah kecamatan dan kelurahan serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diatas, adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Perubahan berbagai peraturan yang begitu cepat yang menyebabkan kesulitan dalam implementasinya.
2. Kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam pengelolaan keuangan di OPD masih rendah yang berakibat belum sempurnanya laporan keuangan Pemerintah Daerah.
3. Kegiatan-kegiatan oleh OPD lebih banyak dilaksanakan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
4. Masih ditemui adanya kegiatan yang tidak terlaksana, baik sebagian maupun seluruhnya yang mengakibatkan SILPA.
5. Koordinasi Pembangunan antar OPD belum sepenuhnya efektif.

6. Masih banyak rancangan produk hukum yang diajukan oleh OPD belum sesuai kaidah dan aturan hukum.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Kota Tebing Tinggi tahun 2017-2022 adalah :

**Menjadikan Kota Tebing Tinggi Sebagai Kota Jasa dan Perdagangan
yang Cerdas, Layak, Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya
Manusia yang Beriman dan Berkualitas**

Visi pembangunan Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 tersebut diatas sebagai gambaran harapan yang ingin dicapai pada periode pembangunan Tahun 2017-2022 yang mengandung makna bahwa masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun kedepan harus menjadi masyarakat beriman, bertaqwa, maju, sejahtera, mandiri dan berkeadilan dalam kebhinekaan.

Visi tersebut memiliki lima makna utama yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Beriman**, yaitu kemampuan untuk mewujudkan masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki potensi, karakteristik, peluang, tantangan, sikap dan pandangan hidup bersama.
2. **Bertaqwa**, yaitu kemampuan untuk mewujudkan kerukunan antar dan intern umat beragama di Kota Tebing Tinggi, saling menghormati antar umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya/kepercayaannya masing-masing sehingga tidak ada konflik antar/inter umat beragama, serta mewujudkan kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan.
3. **Maju**, yaitu kemampuan untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi menjadi pusat perdagangan secara regional, kawasan transit lalu lintas orang dan barang dari dan menuju Kota Medan serta didukung dengan munculnya kota-kota baru, pasar-pasar dengan produk khusus dan lain-lain dengan tetap menyelaraskan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat perdagangan tradisional.

Kemajuan Pembangunan Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga ditandai oleh adanya transformasi struktur perekonomian kota menuju perekonomian yang modern, yang ditandai oleh dominasi sektor tertier dan sekunder khususnya jasa dan industri pengolahan.

Kemajuan ekonomi Kota Tebing Tinggi pada masa yang akan datang juga didorong oleh peningkatan efisiensi perekonomian kota, sehingga pengelolaan sumber daya ekonomi

yang rasional dan efisien akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, ketahanan ekonomi lokal yang kuat dan kokoh serta keterkaitan antar sektor-sektor ekonomi khususnya sektor industri dan jasa yang tinggi, serta berwawasan lingkungan.

4. **Sejahtera**, yaitu kemampuan untuk mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang sejahtera, yaitu masyarakat yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat yang diikuti dengan peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, rasa aman masyarakat dan diimbangi dengan pemerataan pendapatan (disparitas), kualitas pendidikan, kesehatan yang lebih baik sehingga tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, terpenuhinya hak dasar masyarakat yang berupa kemudahan akses pendidikan, akses kesehatan dan paritas daya beli, tersedianya infrastruktur secara merata dan terciptanya lapangan pekerjaan yang memadai serta terciptanya dan terjalannya rasa aman dan tentram dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi masyarakat.
5. **Mandiri**, yaitu kemampuan mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang memiliki fasilitas perkotaan modern, yang dapat memberikan pelayanan publik yang handal kepada seluruh masyarakat di wilayah sekitarnya, dimana Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa, diarahkan menuju layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang berskala regional dan nasional, layanan informasi dan teknologi yang tinggi serta berfungsi sebagai layanan keuangan regional dengan dukungan perbankan, tempat hiburan, pendidikan dan kesehatan, dengan lingkungan yang nyaman, tertib, aman, rapi, indah dan bersahabat.
6. **Berkeadilan dalam Kebhinekaan**, yaitu kemampuan mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang memiliki produktivitas ekonomi yang tinggi, yang dapat mendorong peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang, sehingga membentuk perekonomian kota yang tangguh, dinamis, progresif dan merata. Keadilan sosial secara nyata diwujudkan melalui fungsi-fungsi distributif yang dikelola oleh Pemerintah Kota, sehingga hak-hak dasar setiap warga kota dapat terpenuhi dan dilindungi, sedangkan keadilan ekonomi terwujud dalam bentuk adanya kesamaan kesempatan dan akses dari setiap warga kota untuk berusaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan visi Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, yakni **Mewujudkan Masyarakat Kota Tebing Tinggi Yang Beriman, Bertaqwa, Maju, Sejahtera, Mandiri, Berkeadilan dalam Kebhinekaan**, maka misi pembangunan Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan mental spritual masyarakat, sumber daya aparatur untuk mewujudkan insan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, secara terpadu, merata, terjangkau, dan memiliki wawasan kebangsaan;
3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup untuk mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan berkualitas;
4. Melanjutkan pembangunan Kota Tebing Tinggi sebagai Kota Jasa yang memiliki produktivitas, inovasi, kreativitas, dengan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana secara terkoordinasi dengan titik berat pada penanggulangan banjir;
6. Melaksanakan pembinaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) secara terpadu menyeluruh dan mensejahterakan masyarakat melalui pemanfaatan usaha yang memiliki prospek;
7. Menyelenggarakan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat untuk meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja;
8. Menyelenggarakan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan secara berkeadilan, taat azas, taat prosedur dengan menjunjung tinggi tertib hukum.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi periode Tahun 2017-2022, maka Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dapat menyelenggarakan fungsi untuk mewujudkan Organisasi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang profesional dan Akuntabel dalam upaya pemantapan koordinasi dan perumusan kebijakan pemerintah daerah melalui tata kelola organisasi yang baik, dinamis dan akuntabel disertai penerapan nilai-nilai spritual dan menjunjung norma-norma yang berlaku, menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dan responsif terhadap peraturan dan dinamika yang berkembang serta melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih, mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan keagamaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan, menyelenggarakan pembinaan administrasi aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bermartabat untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi, menyelenggarakan pelayanan kedinasan Walikota dan Wakil Walikota sebagai sarana peningkatan komunikasi dengan masyarakat, pimpinan daerah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi aktual yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan serta signifikan bagi daerah sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan sampai dengan saat ini dan memperhatikan analisis lingkungan internal yang mencakup kekuatan, kelemahan dan lingkungan eksternal mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan RPJMD Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022, dan dalam rangka menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas secara sinergis, partisipatif dan akuntabel, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

- a. Reformasi Birokrasi dalam upaya menuju Penyelenggaraan *Good and Clean Governance*;
- b. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih mengedepankan *Customer Satisfaction*;
- c. Kerjasama antar daerah dalam upaya memperkuat dan meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi adalah pernyataan tentang tujuan dan cita-cita yang realistis dan menarik yang ingin dicapai sebuah organisasi di masa depan. Visi merupakan artikulasi sebuah tempat yang dituju oleh organisasi, sebuah masa depan organisasi yang lebih baik, lebih sukses, dan lebih diinginkan daripada kini (Nanus, 1992). Berdasarkan pengertian visi di atas dan dari hasil identifikasi isu-isu strategis dan analisis lingkungan internal dan eksternal menggunakan teknik analisis SWOT yang telah dilakukan, Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan visinya sebagai berikut:

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI MENJADI
ORGANISASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM UPAYA
PEMANTAPAN KOORDINASI DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH DAERAH**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, misi yang akan dicapai adalah:

1. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik, dinamis, dan akuntabel disertai penerapan nilai-nilai spritual dan menjunjung norma-norma yang berlaku;
2. Menyusun kebijakan Pemerintah Daerah yang sinergi dan responsif terhadap peraturan dan dinamika yang berkembang serta melaksanakan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka perwujudan pemerintah yang baik dan bersih;
3. Mengembangkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial dan pelayanan keagamaan yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai keagamaan;
4. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan bermartabat untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi;
5. Menyelenggarakan Pembinaan dan Penataan Batas Wilayah antarkelurahan, antarkecamatan dan antardaerah lainnya;
6. Menyelenggarakan pelayanan kedinasan walikota dan wakil walikota sebagai sarana peningkatan komunikasi dengan masyarakat, pimpinan daerah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

A. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Menurut Salusu (2000 : 133), tujuan dapat diartikan sebagai kondisi jangka panjang yang diinginkan, yang dinyatakan dalam istilah yang umum dan kualitatif, dan mungkin hanya sebagian yang bisa dicapai. Secara lebih spesifik Thompson dan Strickland (2001 : 9) mendefinisikan tujuan sebagai target-target kinerja organisasi, baik hasil maupun *outcome* yang ingin dicapai oleh perusahaan. Tujuan tersebut berfungsi sebagai alat ukur dari kinerja dan kemajuan organisasi.

Berdasarkan pengertian tentang tujuan di atas dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan Sekretariat Daerah Kota Kota Tebing Tinggi dalam lima tahun ke depan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Mengembangkan organisasi yang baik dan tanggap perubahan
 - 1.2. Meningkatkan kinerja aparatur Sekretariat Daerah
 - 1.3. Meningkatkan kualitas spritual, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai agama bagi ASN dan Non-ASN
2. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Daerah
 - 2.2. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja OPD
 - 2.3. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi yang komunikatif, serta meningkatkan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat dan *stake holder*.
 - 2.4. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik pada Kecamatan dan Kelurahan
3. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat masyarakat.
 - 3.2. Meningkatkan upaya pelayanan keagamaan
4. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Mengembangkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang efisiensi, efektif, dan akuntabel.

- 4.2. Meningkatkan kualitas, kapasitas, dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah untuk mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih.
5. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Kelima Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Meningkatkan akurasi batas wilayah antarkelurahan, antarkecamatan dan antar daerah lainnya.
6. Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.1. Meningkatkan komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat, pimpinan daerah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah lainnya.
 - 6.2. Meningkatkan kerjasama dengan badan-badan usaha dan pemerintah daerah lainnya.

B. SASARAN

Menurut Collis dan Montgomery (1998 : 8) sasaran merupakan bagian dari tujuan, yaitu tujuan jangka pendek yang disebut *objective*, sedang tujuan jangka panjang disebut *goals*. *Objective* atau sasaran berisi ungkapan kuantitatif yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah. Sedangkan *goals* atau tujuan berisi ungkapan kualitatif yang ingin dicapai dalam jangka panjang.

Berdasarkan pengertian tentang sasaran di atas dan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang ingin diwujudkan adalah :

- 1.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.1.1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja organisasi
 - 1.1.2. Meningkatnya manajemen organisasi
- 1.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.2.1. Meningkatnya kinerja, profesionalisme dan disiplin ASN Sekretariat Daerah.
- 1.3. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Ketiga dari Misi Pertama Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 1.3.1. Meningkatnya kesadaran keagamaan ASN
- 2.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

- 2.2 Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.2.1 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan OPD
 - 2.2.2 Meningkatnya Kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah yang disusun OPD
 - 2.2.3 Meningkatnya penyelesaian examinasi atas Rancangan Produk Hukum Daerah yang diajukan OPD
- 2.3 Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Ketiga dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.3.1 Meningkatnya informasi kegiatan Pemerintah dan Pembangunan kepada masyarakat
- 2.4 Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Keempat dari Misi Kedua Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 2.4.1 Meningkatnya pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pelayana Publik pada Kecamatan dan Kelurahan
- 3.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.1.1. Meningkatnya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
- 3.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Ketiga Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 3.2.1. Meningkatnya upaya pelayanan keagamaan kepada masyarakat
- 4.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.1.1. Meningkatnya pengelolaan administrasi pemerintahan daerah
- 4.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Keempat Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 4.2.1 Meningkatnya kinerja, profesionalisme dan disiplin aparatur pemerintah daerah.
- 5.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Kelima Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 5.1.1. Meningkatnya kesesuaian batas wilayah antarkelurahan, antarkecamatan dan antardaerah lainnya.
- 6.1. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Pertama dari Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.1.1. Meningkatnya partisipasi masyarakat pimpinan daerah, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah
- 6.2. Sasaran yang akan diwujudkan untuk mencapai Tujuan Kedua dari Misi Keenam Renstra Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut :
 - 6.2.1. Meningkatnya kerjasama dengan badan-badan usaha dan pemerintah daerah lainnya

Tabel C 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE -					OPD
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	Cakupan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan dan kelurahan.	90	90	90	90	90	Tapem
			Persentase implementasi hasil kesepakatan kerjasama.	90	90	90	90	90	Tapem
			Nilai dan pemeringkatan LPPD.	3	3	3	3	3	Tapem
			Jumlah pilar batas daerah.	25	25	25	25	25	Tapem
			Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	Umum
			Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemda	80	80	85	85	90	Humas
		Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional	Peringatan hari - hari besar keagamaan	100%	100%	100%	100%	100%	Kesra
			Jumlah Rumah Ibadah yang menyelenggarakan palatiahn bidang agama	140 Rumah Ibadah	160 rumah ibadah	180 rumah ibadah	200 rumah ibadah	220 rumah ibadah	Kesra
			Pengembangan potensi masyarakat dalam bidang keagamaan dan seni	100%	100%	100%	100%	100%	Kesra
			Peringatan hari - hari besar Nasional dan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Kesra
			Persentase seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan	75%	80%	90%	100%	100%	Organisasi

		Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum.	Meningkatnya kapasitas SDM mengenai jurnalistik, kehumasan dan keprotokolan.	70	70	75	75	80	Humas
			Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	70	70	75	75	80	Humas
			Tertingkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	70	75	80	85	90	Humas
			Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik.	70	75	80	85	90	Humas
			Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign.	70	70	75	75	80	Humas
			Persentase penanganan masalah hukum	20%	30%	40%	60%	80%	Hukum
			Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	20%	40%	60%	80%	80%	Hukum
			Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	20%	40%	60%	80%	80%	Hukum
			Persentase Produk Hukum Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan	20%	40%	60%	80%	80%	Hukum
		Terwujudnya Pemerintah dan masyarakat yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	20%	40%	60%	80%	80%	Hukum
			Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui internet oleh pegawai pemerintah dan masyarakat	0%	30%	50%	60%	80%	Hukum
		Terwujudnya peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan	Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	Organisasi
			Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan survey IKM	70%	80%	90%	100%	100%	Organisasi
			Jumlah organisasi perangkat daerah yang telah	50%	100%	100%	100%	100%	Organisasi

			memiliki standar operasional prosedur						
			Tingkat akuntabilitas kinerja kondisi awal BB menjadi B						Organisasi
			Terlaksananya paket pengadaan secara elektronik	100	100	100	100	100	Ekbang
			Terpublikasinya Dokumen SIRUP	100	100	100	100	100	Ekbang
			Terjaganya Stabilitas Harga Kebutuhan Bahan Pokok	100	100	100	100	100	Ekbang
			Terpantaunya Penyaluran LPG Bersubsidi	100	100	100	100	100	Ekbang
2	Meningkatkan Investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Tersedianya infra struktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan	Terlaksananya Operasi Pasar		100	100	100	100	Ekbang
			Terlaksananya Operasional Pendistribusian RASTRA	100	100	100	100	100	Ekbang
3	Terwujudnya Smart City di Kota Tebing Tinggi yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat	Terwujudnya pelayanan publik berbasis e-government dan e-kelurahan.	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi e-kecamatan dan e-kelurahan.	80	80	80	80	80	Tapem
4	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.	Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.	Tersedianya tanah untuk pembangunan gedung kantor.	80	80	80	80	80	Tapem

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Kesehatan kurun waktu 2017-2022 seperti pada tabel C.26

Tabel C. 26

Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan

VISI : Menjadikan Kota Tebing Tinggi Menjadi Kota jasa dan Perdagangan yang Beriman, Cerdas, Layak Mandiri dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia					
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Kota tebing Tinggi yang baik					
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas	1.1. Terwujudnya peran nyata pemerintah diseluruh aspek kehidupan	1.1.1. Peningkatan kehadiran pemerintah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat 1.1.2. Peningkatan kehadiran pemerintah di seluruh aspek kehidupan masyarakat 1.1.3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja	1.1.1.1. Mengembangkan pelayanan publik berbasis budaya pelayanan prima. 1.1.2.1. Meningkatkan standar kualitas pelayanan publik 1.1.2.2. Mengembangkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 1.1.3.1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja	Bagian Adm. Ekbang Bagian Organisasi Bagian Organisasi Bagian Organisasi

		1.2. Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	1.2.1. Pengelolaan manajemen pemerintahan yang mengacu pada pelayanan prima	1.2.1.1. Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan keprotokolan pemerintah daerah.	Bagian Umum dan Perlengkapan
				1.2.2.1. Menata SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.	Bag. Adm. Pemerintahan
				1.2.3. Meningkatkan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan, dan keprotokolan pemerintah daerah.	Bagian Adm. Humas PP
		1.3. Terwujudnya Peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional	1.3.1. Peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkompetensi sesuai dengan potensi lokal	1.3.1.1. Menyelenggarakan analisis jabatan berbasis keahlian dan kompetensi pegawai dengan pemantapan kelembagaan	Bagian Organisasi

				1.3.1.2.	Penyelenggaraan hari - hari besar keagamaan	Bagian Kesra
				1.3.1.3.	Pemberian Pelatihan kepada anak usia sekolah dibidang keagamaan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia dan keimanan.	Bagian Kesra
				1.3.1.4.	Pengembangan potensi masyarakat dalam bidang keagamaan dan seni	Bagian Kesra
				1.3.1.5.	Menyelenggarakan hari - hari besar nasioanal dan Daerah	Bagian Kesra

		1.4. Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum.	1.4.1. Perwujudan aksesibilitas dan transparansi kegiatan pemerintahan.	1.4.1.1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kegiatan pemerintahan.	Bagian Adm. Humas PP
				1.4.1.2. Menyelenggarakan keterbukaan informasi pemerintahan daerah.	Bagian Adm. Humas PP
			1.4.2. Perwujudan Kepastian Hukum dalam setiap kegiatan pemerintah	1.4.2.1. Mengoptimalkan proses persoalan hukum	Bagian Hukum
				1.4.2.2. Melakukan kajian hukum terhadap produk-produk kebijakan daerah	Bagian Hukum
				1.4.2.3. Menyediakan produk hukum daerah yang menunjang setiap kebijakan pemerintah daerah.	Bagian Hukum

2	Terwujudnya Smart City di Kota Tebing Tinggi yang berbasis informasi teknologi dengan aplikasi data base yang akurat	1.5.	Terwujudnya Pemerintah dan masyarakat yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	1.5.1.	Perwujudan Kepastian Hukum dalam setiap kegiatan pemerintah	1.5.1.1.	Meningkatkan keselarasan peraturan daerah dengan produk hukum lainnya.	Bagian Hukum
						1.5.1.2.	Meningkatkan informasi pegawai dan masyarakat terhadap produk-produk hukum.	Bagian Hukum
		2.1.	Terwujudnya pelayanan publik berbasis e-government dan e-kelurahan.	2.1.1.	Pemanfaatan teknologi informasi dengan pembentukan sistem pelayanan berbasis elektronik.	2.1.1.1.	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengakses pelayanan publik menuju smart city.	Bag. Adm. Pemerintahan

MISI II : Mewujudkan Tebing Tinggi sebagai pusat wilayah dan perdagangan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	<p>3.1. Tersedianya infra struktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>3.2. Meningkatkan iklim investasi Daerah</p>	<p>3.1.1 Penyediaan fasilitas penunjang aktivitas perdagangan</p> <p>3.2.1. Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok</p>	<p>3.1.1.1 Peningkatan efisiensi perdagangan melalui penataan lembaga perdagangan.</p> <p>3.2.1.1. Meningkatkan ketahanan pangan dan pengawasan kualitas bahan makanan.</p>	<p>Bagian Adm. Ekbang</p> <p>Bagian Adm. Ekbang</p>

MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	OPD
1	2	3	4	5	6
4	Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.	4.1. Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.	4.1.1. Memfasilitasi pelaporan, validasi, dan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk masyarakat pemilik lahan.	4.1.1.1. Memfasilitasi pelaporan, validasi, dan pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk masyarakat pemilik lahan.	Bag. Adm. Pemerintahan

Bab VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan dapat di lihat pada Tabel C.27 berikut ini:

Tabel C.27
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun - 1		Tahun – 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		4.01.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani.															
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.03.06.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat.		12	742.140.000	12	866.844.000	12	953.528.000	12	1.048.881.000	12	1.153.769.000	12	4.765.162..000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar/ Majalah.	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air Dan Listrik.		12	950.000.000	12	1.367.784.000	12	1.504.562.000	12	1.655.018.200	12	1.820.520.000	12	7.297.884.200	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.01.05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.	Terpeliharanya Kendaraan Dinas, Gedung Kantor dan Rumah Dinas Pemko Tebing Tinggi.		12	404.250.000	12	465.850.000	12	512.435.000	12	563.678.500	12	620.047.000	12	2.566.260.500	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan, keamanan dan peralatan kantor.	Terjaga kebersihan kantor sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	950.000.000	12	987.184.000	12	1.085.902.400	12	1.194.493.000	12	1.313.942.300	12	5.531.521.700	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya ATK dapat melancarkan kegiatan-kegiatan di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	170.415.000	12	275.000.000	12	302.500.000	12	332.750.000	12	336.025.000	12	1.446.690.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi

		4.01.03.06.0 1.11	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan.	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan dapat melancarkan kegiatan-kegiatan di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	94.500.000	12	165.000.000	12	181.500.000	12	199.650.000	12	219.615.000	12	860.265.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 1.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan.	Terpenuhiya Komponen instalasi listrik/ penerangan dapat melancarkan kegiatan-kegiatan di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	45.675.000	12	117.150.000	12	128.865.000	12	141.751.500.	12	155.927.000	12	589.368.500	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 1.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Lancarnya kegiatan-kegiatan untuk rapat dan koordinasi ke luar daerah.		12	2.000.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	12	2.928.200.000	12	3.221.020.000	12	13.231.220.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 1.21	Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	Menjaga kesehatan Walikota dan Wakil Walikota untuk tetap keadaan prima.		12	150.000.000	12	180.000.000	12	198.000.000	12	217.800.000	12	221.812.000	12	967.612.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh SDM yang beriman dan berkualitas.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	4.01.03.01.1 8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.	Terpenuhiya biaya perjalanan dinas.	30	100	45.000.000	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	300.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Penyediaan Surat Kabar Majalah.	Tersedianya surat kabar/majalah bagi Humas dan Pimpinan Pemko Tebing Tinggi.		80	162.000.000	80	178.200.000	85	196.020.000	85	215.622.000	90	237.184.200	90	989.026.200	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.	Tersedianya pemeliharaan untuk peralatan dokumentasi.		90	5.000.000	90	5.500.000	90	6.050.000	90	6.655.000	90	7.320.500	90	30.525.500	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggadaan		80	395.000.000	80	434.500.000	85	477.950.000	85	525.745.000	90	578.319.500	90	2.411.514.500	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah	Tersedianya rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daera		80	120.000.000	80	150.000.000	85	165.000000	85	181.500.000	90	199.650.000	90	816.150.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkeadilan.	Peran nyata pemerintah diseluruh aspek kehidupan.		Pelayanan Operasional LPSE.	Terlaksananya Paket Pengadaan barang dan Jasa secara Elektronik.	100%	100%	680.000.000	100%	748.000.000	100%	823.000.000	100%	905.000.000	100%	996.000.000	100%	4.152.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional.	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum	4.01.4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Pemerintahan.	90%	90%	3	90%	4	90%	5	95%	6	95%	7	95%	7		
		4.01.4.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.	Tersedianya buku bahan bacaan peraturan perundang-undangan.	90%	90%	3.000.000	90%	4.000.000	90%	5.000.000	95%	6.000.000	95%	7.000.000	95%	7.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum	4.01.4.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Terpenuhi standar sarana dan prasarana kerja bagi aparatur.															
		4.01.4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.	90%	90%	10.000.000	90%	20.000.000	90%	22.000.000	95%	25.000.000	95%	28.000.000	95%	105.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
		4.01.4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.	90%	90%	18.000.000	90%	45.000.000	90%	50.000.000	95%	55.000.000	95%	60.000.000	95%	228.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkeadilan.	Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.																
		4.01.03.01.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Jumlah sarana dan prasarana kantor.		90	95.000.000	90	100.000.000	90	105.000.000	90	110.000.000	90	115.000.000	90	525.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.	Tersedianya gedung kantor yang sudah direhabilitasi.		90	70.000.000	90	75.000.000	90	80.000.000	90	85.000.000	90	90.000.000	90	400.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkeadilan.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	4.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya perlengkapan gedung kantor.	37,70	100	35.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	195.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	4.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor.	Terpenuhiya peralatan gedung kantor.	36,40	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	175.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Terpenuhiya perlengkapan gedung kantor.	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	600.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Terpenuhiya peralatan gedung kantor.	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	600.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.03.06.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional.	Terpenuhiya Kendaraan Dinas/ Operasional.		12	2.100.000.000	12	2.266.000.000	12	2.492.600.000	12	2.741.860.000	12	3.016.046.000	12	12.616.506.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Terpenuhiya Perlengkapan Gedung Kantor di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	438.585.000	12	522.830.000	12	575.113.000	12	632.625.000	12	695.887.500	12	2.865.040.500	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.08	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas.	Terpenuhiya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas.		12	472.500.000	12	517.000.000	12	568.700.000	12	625.570.000	12	688.127.000	12	2.871.897.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.	Terpenuhiya Peralatan Gedung Kantor di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	22.050.000	12	222.200.000	12	244.420.000	12	268.862.000	12	295.748.200	12	1.053.280.200	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.10	Pengadaan Mebeleur.	Terpenuhiya Pengadaan Mebeleur.		12	73.500.000	12	202.000.000	12	222.200.000	12	244.420.000	12	268.862.000	12	1.010.982.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas.	Terpeliharanya Taman dan Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah.		12	1.082.623.000	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	12	1.597.200.000	12	1.756.920.000	12	7.208.743.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.22	Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor.	Terpeliharanya gedung Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	546.000.000	12	572.000.000	12	629.200.000	12	692.120.000	12	761.332.000	12	3.200.652.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional.	Terpeliharanya kendaraan dinas di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	1.500.000.000	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	12	10.782.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	131.250.000	12	217.800.000	12	239.580.000	12	263.538.000	12	289.892.000	12	1.142.060.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi

		4.01.03.06.0 2.27	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan rumah jabatan/ dinas.	Terpeliharanya peralatan di rumah dinas.		12	120.750.000	12	330.352.000	12	363.388.000	12	399.727.000	12	439.700.000	12	1.653.917.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 2.28	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	Terpeliharanya peralatan di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	155.925.000	12	226.039.000	12	248.643.000	12	273.508.000	12	300.858.000	12	1.204.973.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 2.29	Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur.	Terpeliharanya mebeleur di Sekretariat Pemko Tebing Tinggi.		12	89.250.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	12	161.051.000	12	650.811.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 2.44	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional.	Terpeliharanya kendaraan dinas Pemko Tebing Tinggi.		12	877.012.000	12	1.266.500.000	12	1.349.150.000	12	1.484.065.000	12	1.632.471.500	12	6.569.198.500	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 2.49	Pemeliharaan Taman.	Terciptanya taman yang indah dan bersih.		12	26.250.000	12	286.000.000	12	314.600.000	12	346.060.000	12	380.666.000	12	1.353.576.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.	Tersedianya perlengkapan gedung kantor pada Bagian Adm. Humas PP.		90	60.000.000	90	66.000.000	90	72.600.000	90	79.860.000	90	87.846.000	90	366.306.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.0 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur																
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.03.06.0 2.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.	Terpenuhnya pakaian dinas KDH dan WKDH.		12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	120.000.000	12	500.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.03.0 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Terpenuhnya Pakaian Kerja Lapangan		12	120.000.000	12	144.353.000	12	158.788.300	12	160.000.000	12	180.000.000	12	763.141.300	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi

		4.01.03.01.0 5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.0 5.01	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan PATEN.	PNS Kecamatan dan Kelurahan memahami PATEN dan tugas lainnya.	70 persen	80	120.000.000	85	130.000.000	90	140.000.000	95	150.000.000	95	160.000.000	95	700.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 5.02	Sosialisasi dan Pelatihan SIM PATEN.	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Penerapan SIM PATEN di Kota Tebing Tinggi.	0	100	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 5.03	Sosialisasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.	Terlaksananya kegiatan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.	0	100	20.000.000	100	25.000.000	100	30.000.000	100	35.000.000	100	40.000.000	100	150.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 5.04	Launching Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM PATEN).	Terlaksananya launching SIM PATEN.	0	100	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 5.05	Sosialisasi dan Pelatihan Sistim Informasi Kecamatan dan Kelurahan.	Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan Sistim Informasi Kecamatan.	0	100	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.0 5.06	Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli).	Terlaksananya pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan Pungutan Liar.		90	350.000.000	90	375.000.000	90	400.000.000	90	425.000.000	90	450.000.000	90	2.000.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 5.07	Rapat Teknis Pembinaan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Teknis Pembinaan Kecamatan.		-	-	80	185.000.000	85	200.000.000	90	215.000.000	95	230.000.000	95	830.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	

		4.01.03.01.0 5.08	Seminar Staf Ahli Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.	Terlaksananya Seminar Staf Ahli Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.		100	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	100	60.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi	
		4.01.03.01.0 5.09	Revitalisasi kapasitas tenaga pendidik.	Terlaksananya revitalisasi kapasitas tenaga pendidik.		-	-	100	500.000.000	-	-	-	-	-	100	500.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi	
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.03.06.0 5.06	Penyediaan Jasa Jaminan Sosial.	Terjaminnya kesehatan tenaga honoror.		12	111.708.000	12	161.933.000	12	178.127.000	12	195.940.000	12	215.534.000	12	863.242.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.0 6	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.0 6.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan.	Tersusunnya laporan keuangan.		100	5.000.000	100	8.000.000	100	10.000.000	100	12.000.000	100	15.000.000	100	50.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan.	Tersusunnya Renstra, Laporan Kinerja Tahunan, Renja, Perjanjian dan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja Utama Sekretariat.	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	70.000.000	100%	300.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Koordinasi Bidang Perekonomian dan pembangunan.	Terselenggaranya koordinasi bidang perekonomian dan pembangunan.	100%	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	2.500.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	4.01.03.06.0 6.05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.	Laporan kegiatan/ program triwulan, semester dan Tahunan.		12	6.900.000	12	7.719.000	12	8.500.000	12	9.350.000	12	10.285.000	12	42.754.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.1 6	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan KDH dan WKDH															Tebing Tinggi
		4.01.03.01.1 6.01	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah.	Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI.	1 Kegiatan	1	200.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	1	225.000.000	5	1.100.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.06.1 6.02	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri.	Terjamunya Tamu-tamu Pemko Tebing Tinggi.		12	700.000.000	12	710.000.000	12	720.000.000	12	740.000.000	12	770.000.000	12	3.640.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.1 6.06	Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya		12	1.750.000.000	12	1.810.000.000	12	1.850.000.000	12	1.870.000.000	12	1.900.000.000	12	9.180.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.1 6.08	Belanja Rumah Tangga KDH dan Wakil KDH	Terpenuhinya belanja rumah tangga KDH dan WKDH.		12	940.000.000	12	950.000.000	12	960.000.000	12	980.000.000	12	990.000.000	12	4.820.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.1 6.09	Penerimaan Kunjungan Tamu-tamu Pejabat Vertikal dan Kunjungan Acara Seremonial.	Terjamunya tamu-tamu pejabat vertikal dan lancarnya acara seremonial.		12	800.000.000	12	810.000.000	12	820.000.000	12	840.000.000	12	860.000.000	12	4.130.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.1 6.10	Kunjungan Silaturahmi Kepala Daerah Dengan Masyarakat.	Terpenuhinya silaturahmi kepala daerah dengan masyarakat.		12	610.000.000	12	620.000.000	12	650.000.000	12	670.000.000	12	680.000.000	12	3.230.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.1 8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.1 8.01	Penyusunan Profil Kelurahan.	Tersusunnya profil kelurahan.		100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	-	-	-	-	100	420.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
			Evaluasi perkembangan kelurahan.	Terlaksananya Evaluasi perkembangan kelurahan.	60 persen	90	150.000.000	90	200.000.000	90	225.000.000	90	250.000.000	90	275.000.000	90	1.100.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi

		4.01.03.01.2 5	Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah.																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.2 5.01	Fasilitasi / Pembentukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga.	Jumlah kerjasama antar daerah dan pihak ketiga yang diselesaikan.	60 persen	90	120.000.000	90	125.000.000	90	130.000.000	90	135.000.000	90	150.000.000	90	660.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Mewujudkan Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum	4.01.4.01.03. 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.	Meningkatnya penataan peraturan perundang-undangan.															
		4.01.4.01.03. 26.03	Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan perundang-undang an memenuhi ketentuan legal drafting.	100%	100%	275.000.000	100%	303.000.000	100%	333.000.000	100%	366.000.000	100%	402.000.000	100%	1.679.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
		4.01.4.01.03. 26.09	Fasilitasi hukum kepada pejabat/aparatur dilingkungan pemerntah kota tebing tinggi.	Terpenuhinya hak hukum kepada pejabat yang menghadapi perkara hukum menyangkut pemko Tebing Tinggi.	100%	100%	295.000.000	100%	324.000.000	100%	356.000.000	100%	392.000.000	100%	431.000.000	100%	1.798.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
	Terwujudnya kepatuhan pemerintah dan masyarakat terhadap peraturan perundang-undang an	4.01.4.01.03. 26.05	Publikasi peraturan perundang-undangan.	SKPD dan Stakeholder memiliki Lembaran Daerah dan Berita Daerah.	80%	80%	46.000.000	85%	51.000.000	85%	55.000.000	85%	61.000.000	85%	67.000.000	85%	280.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
		4.01.4.01.03. 26.07	Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum.	Masyarakat dan stakeholder mendapat penyuluhan hukum1.	100%	100%	136.000.000	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	181.000.000	100%	199.000.000	100%	831.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi

		4.01.4.01.03.26.10	Koordinasi penataan peraturan perundang-undangan	Peningkatan SDM di Bidang Hukum	100%	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	71.000.000	100%	78.000.000	100%	86.000.000	100%	360.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
		xxxx	JDIH Pemerintah Kota Tebing Tinggi	Aparatur pemerintah dan masyarakat mendapatkan informasi produk hukum	0%	0%	0	80%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	260.000.000	Bagian Hukum	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru.																
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya Manusia yang beriman dan berkualitas.	Sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.	4.01.03.01.27.01	Perlombaan Kecamatan	Juara Kecamatan Tingkat Kota Tebing Tinggi		100	110.000.000	100	160.000.000	100	180.000.000	100	200.000.000	100	220.000.000	100	870.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.27.02	Hari Otonomi Daerah.	Terlaksananya upacara hari otonomi daerah dengan hikmat dan tertib.		100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	100	425.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan buku kecamatan dalam angka.	Tersedianya data kecamatan yang sesuai dengan Standart Nasional.		-	-	100	70.000.000	100	70.000.000	100	75.000.000	100	80.000.000	100	295.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
			Penyediaan barang cetak dan penggandaan buku administrasi kecamatan dan kelurahan.	Tersedianya data kecamatan dan kelurahan dalam bentuk buku.		-	-	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	330.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.27.03	Penyusunan LPPD dan Suplemen.	Penyusunan LPPD dan jumlah dokumen buku LPPD dan suplemen LPPD.	2	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	1.000.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.27.05	Konsultasi dan Koordinasi di Bidang Pemerintahan.	Jumlah rapat-rapat bidang pemerintahan.		90	230.000.000	90	300.000.000	90	350.000.000	90	400.000.000	90	450.000.000	90	1.730.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.27.06	Perlombaan Kelurahan Terbaik.	Juara Kelurahan Tingkat Kota Tebing Tinggi.		100	175.000.000	100	250.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	100	1.475.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
			Fasilitasi penanganan permasalahan masyarakat pada wilayah kecamatan dan kelurahan.	Terlaksananya fasilitasi penanganan permasalahan masyarakat pada wilayah kecamatan dan kelurahan.	0	-	-	100	150.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	650.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi

		4.01.03.01.2 8	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.																
Terwujudnya Smart City di Kota Tebing Tinggi yang berbasis Informasi Teknologi dengan aplikasi data base yang akurat	Terwujudnya pelayanan publik berbasis e-government dan e-kelurahan.	4.01.03.01.2 8.01	Pembuatan, Pengadaan Server jaringan dan Internet Sistim Informasi Kecamatan.	Tersedianya Server jaringan dan Internet.		100	240.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	-	-	-	-	100	865.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.2 8.02	Sistim Informasi Kecamatan dan Kelurahan.	Terlaksananya penerapan sistem informasi kecamatan.	40 persen	60	75.000.000	70	75.000.000	75	75.000.000	80	75.000.000	95	75.000.000	95	375.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.2 8.03	Sistim Informasi Manajemen Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (SIM PATEN).	Tersusunnya sistem informasi terhadap layanan publik (SIM PATEN).		80	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	80	100.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.	Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan.	4.01.03.01.2 9	Program Penegasan Batas Daerah.																
		4.01.03.01.2 9.01	Fasilitasi Penegasan Batas Antar Daerah.	Terlaksananya penegasan batas antar daerah.	0	10	250.000.000	15	350.000.000	20	400.000.000	25	450.000.000	0	-	70	1.450.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
		4.01.03.01.3 6	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.																
		4.01.03.01.3 6.01	Pengadaan Tanah untuk Kantor Kelurahan Satria.	Tersedianya tanah untuk kantor Kelurahan Satria.	0	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	500.000.000	80	2.500.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi
			Pendaftaran Tanah Sistematis	Jumlah sertifikat tanah yang didaftarkan.	0	70	1.500.000.000	90	1.750.000.000	0	-	0	-	0	-	90	3.250.000.000	Bag. Administrasi Pemerintahan	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh Sumber Daya manusia yang beriman dan berkualitas		4.01.03.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur																
	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.	4.01.03.17.17	Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja.	Adanya Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) pada setiap OPD.	70	75	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	450.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
	Terwujudnya peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan.	4.01.03.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah																
		4.01.03.38.01	Penataan susunan Organisasi Perangkat daerah.	Adanya organisasi perangkat daerah yang sesuai peraturan perundang-undang an.	100	100	115.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	150.000.000	100	160.000.000	100	695.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
	Terwujudnya peran nyata pemerintah di seluruh aspek kehidupan.	4.01.03.38.02	Koordinasi penyusunan pedoman pelayanan publik	Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).	50	100	20.000.000	100	30.000.000	100	40.000.000	100	45.000.000	100	50.000.000	100	185.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional.	4.01.03.38.03	Pemetaan jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu.	Adanya Kamus Jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu pada setiap OPD.	-	70	70.000.000	80	80.000.000	90	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	450.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
		4.01.03.39	Program Pembinaan Kinerja Pemerintah Daerah																
Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum.	4.01.03.39.01	Laporan Kinerja Pemerintah.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kondisi Awal BB menjadi B.	CC	CC	150.000.000	CC	160.000.000	CC	170.000.000	CC	180.000.000	B	200.000.000	B	860.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi	

	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum.	4.01.03.39.02	Penyusunan perjanjian kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	Adanya Perjanjian Kinerja di setiap OPD.	-	50	70.000.000	70	80.000.000	80	90.000.000	90	100.000.000	100	110.000.000	100	450.000.000	Bagian Organisasi	Tebing Tinggi
Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Infra struktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Acuan dalam penyusunan Anggaran															
Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Infra struktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan		Penyusunan Standar satuan harga	Tersusunnya buku standar satuan harga sebagai acuan dalam penyusunan anggaran.	100%	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	100%	140.000.000	100%	650.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Pembinaan dan Operasional OPK RASTRA.	Terselenggaranya penyaluran RASTRA.	100%	100%	472.000.000	100%	520.000.000	100%	572.000.000	100%	629.000.000	100%	692.000.000	100%	2.885.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
		4.01.03.06.17.15	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.		12	100.000.000	12	120.000.000	12	140.000.000	12	160.000.000	12	180.000.000	12	700.000.000	Bag. Adm.Umum Dan Perlengkapan	Tebing Tinggi
			Program Pengembangan sistem pendukung usaha mikro kecil menengah.	Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama ekonomi dan Pembangunan.															
Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang beriman dan berkualitas	Peran nyata pemerintah diseluruh aspek kehidupan		<i>Koordinasi, monitoring dan evaluasi perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM.</i>	<i>Terkoordinasi dan termonitornya perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM di Kota Tebing Tinggi.</i>			45.000.000		50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		275.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			<i>Sosialisasi Pengembangan Usaha.</i>	<i>Terlaksananya Sosialisasi pengembangan usaha (Diskusi Perspektif Ekonomi).</i>			116.000.000		120.000.000		125.000.000		130.000.000		135.000.000		626.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terselenggaranya Promosi dan Kerjasama ekonomi dan Pembangunan															

Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat	Infra struktur sarana dan prasarana perdagangan yang berkualitas dan berkelanjutan		Operasi Pasar.	Terselenggaranya Operasi Pasar.	100%	100%	50.000.000	100%	55.000.000	100%	61.000.000	100%	67.000.000	100%	74.000.000	100%	307.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Promosi Potensi Daerah.	Terselenggaranya Pameran(Expo) produk Tebing Tinggi.	0%	100%	140.000.000	100%	145.000.000	100%	150.000.000	100%	155.000.000	100%	160.000.000	100%	750.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
Tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumberdaya manusia yang beriman dan berkualitas	Peran nyata pemerintah diseluruh aspek kehidupan		<i>Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.</i>	<i>Tersedianya data/informasi harga dan kebijakan distem prosedur pengawasan.</i>															Tebing Tinggi
			Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan (Terpublikasinya dokumen SiRUP).	100%	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	600.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah.	Terjaganya stabilitas harga pangan pokok.	100%	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	260.000.000	100%	1.100.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
			Monitoring dan Evaluasi Penyaluran LPG.	Termonitornya penyaluran LPG bersubsidi.	100%	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	130.000.000	100%	140.000.000	100%	150.000.000	100%	650.000.000	Bagian Adm. Ekbang	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		<i>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.</i>																Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.	Dilaksanakannya Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.	100%	100%	335.000.000	100%	405.000.000	100%	420.000.000	100%	435.000.000	100%	450.000.000	100%	450.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW.	Dilaksanakannya Peringatan Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW.	100%	100%	310.000.000	100%	345.000.000	100%	365.000.000	100%	400.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Pelaksanaan kegiatan Bulan Suci Ramadhan.	Dilaksanakannya kegiatan Bulan Suci Ramadhan.	100%	100%	1.120.000.000	100%	1.230.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.285.000.000	100%	1.330.000.000	100%	1.330.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri.	Dilaksanakannya Takbiran Idul Fitri.	100%	100%	75.000.000	100%	85.000.000	100%	105.000.000	100%	140.000.000	100%	185.000.000	100%	185.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Sholat Idul Fitri.	Dilaksanakannya Sholat Idul Fitri.	100%	100%	85.000.000	100%	93.000.000	100%	113.000.000	100%	148.000.000	100%	193.000.000	100%	193.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Takbiran Idul Adha.	Dilaksanakannya Takbiran Idul Adha.	100%	100%	70.000.000	100%	75.000.000	100%	95.000.000	100%	130.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Sholat Idul Adha.	Pelaksanaan Sholat Idul Adha.	100%	100%	101.000.000	100%	109.000.000	100%	129.000.000	100%	164.000.000	100%	209.000.000	100%	209.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Kuliah Agama/Bimbingan Rohani di Lingkungan Pemko T.Tinggi.	Dilaksanakannya Kuliah Agama/Bimbingan Rohani di Lingkungan Pemko T.Tinggi.	100%	100%	700.000.000	100%	735.000.000	100%	755.000.000	100%	790.000.000	100%	835.000.000	100%	835.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ.	Dilaksanakannya Kegiatan dan Pembinaan LPTQ dan MTQ.	100%	100%	890.000.000	100%	910.000.000	100%	930.000.000	100%	965.000.000	100%	1.010.000.000	100%	1.010.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pemberangkatan Calon Jema'ah Haji asal Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Tampung Tawar dan Pemberangkatan Calon Jema'ah Haji asal Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	800.000.000	100%	830.000.000	100%	850.000.000	100%	885.000.000	100%	930.000.000	100%	930.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Tampung Tawar dan Pengembalian Jema'ah Haji asal Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Tampung Tawar dan Pengembalian Jema'ah Haji asal Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	170.000.000	100%	178.000.000	100%	198.000.000	100%	233.000.000	100%	278.000.000	100%	278.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Tablig akbar dan Haflah Al-Quran memeriahkan peringatan Tahun Baru 1 Muharam	Dilaksanakannya Tablig akbar dan Haflah Al-Quran memeriahkan peringatan Tahun Baru 1 Muharam.	100%	100%	315.000.000	100%	335.000.000	100%	355.000.000	100%	390.000.000	100%	435.000.000	100%	435.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi

			Pelaksanaan Kegiatan Nuzulul Al-Quran.	Dilaksanakannya Kegiatan Nuzulul Al-Quran.	100%	100%	82.000.000	100%	89.000.000	100%	109.000.000	100%	144.000.000	100%	189.000.000	100%	189.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Halal Bi Halal PNS se-Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Halal Bi Halal PNS se-Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	165.000.000	100%	185.000.000	100%	205.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Pelaksanaan Gerakan Gemar Mengaji Ba'da Magrib.	Dilaksanakannya Gerakan Gemar Mengaji Ba'da Magrib.	100%	100%	1.450.000.000	100%	1.600.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.800.000.000	100%	1.845.000.000	100%	1.845.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Pelaksanaan Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional.	Dilaksanakannya Kegiatan Utusan MTQ Tingkat Propinsi dan Nasional.	100%	100%	405.000.000	100%	435.000.000	100%	455.000.000	100%	490.000.000	100%	535.000.000	100%	535.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas			Kegiatan Perayaan Natal Ouikumene Masyarakat Se - Kota Tebing Tinggi .	Dilaksanakannya Kegiatan Perayaan Natal Ouikumene Masyarakat Se - Kota Tebing Tinggi .	100%	100%	335.000.000	100%	345.000.000	100%	365.000.000	100%	400.000.000	100%	445.000.000	100%	445.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas			Kegiatan Perayaan Natal PNS PEMKO Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Kegiatan Perayaan Natal PNS PEMKO Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	90.000.000	100%	95.000.000	100%	115.000.000	100%	150.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas			Kenduri Muharram, Dzikkir dan Khattam Al Qur'an Akbar.	Dilaksanakannya Kenduri Muharram, Dzikkir dan Khattam Al Qur'an Akbar.	100%	100%	279.000.000	100%	295.000.000	100%	315.000.000	100%	350.000.000	100%	395.000.000	100%	395.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Kegiatan Pelaksanaan MTQ Tingkat Nasional di Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya MTQ Tingkat Nasional di Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan di Kota Tebing Tinggi.	0%	100%	2.000.000.000	0%	0	0%	20.000.000	0%	55.000.000	0%	100.000.000	0%	100.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi

	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Kegiatan BAKOR PAKEM.	Dilaksanakannya Kegiatan BAKOR PAKEM.	100%	100%	305.000.000	100%	400.000.000	100%	420.000.000	100%	455.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Perayaan Paskah masyarakat Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Perayaan Paskah masyarakat Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	175.000.000	100%	185.000.000	100%	205.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			<i>Pogram Pengembangan Nilai Budaya.</i>																
			Lomba Sholat jenazah bagi siswa SMP dan SMA serta utusan Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Lomba Sholat jenazah bagi siswa SMP dan SMA serta utusan Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	160.000.000	100%	185.000.000	100%	215.000.000	100%	250.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Lomba busana muslim bagi siswa TK, SD, SMP dan SMA sederajat se Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Lomba busana muslim bagi siswa TK, SD, SMP dan SMA sederajat se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	165.000.000	100%	190.000.000	100%	225.000.000	100%	260.000.000	100%	305.000.000	100%	305.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Lomba Pemilihan Da'i muda anak-anak dan Remaja Tk SD, SMP dan SMA sederajat se Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Lomba Pemilihan Da'i muda anak-anak dan Remaja Tk SD, SMP dan SMA sederajat se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	156.000.000	100%	175.000.000	100%	205.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Lomba membaca ayat-ayat pendek bagi siswa SD dan SMP sederajat se Kota Tebing Tinggi .	Dilaksanakannya Lomba membaca ayat-ayat pendek bagi siswa SD dan SMP sederajat se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	135.000.000	100%	165.000.000	100%	200.000.000	100%	235.000.000	100%	280.000.000	100%	280.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas			Lomba Marhaba tingkat Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Lomba Marhaba tingkat Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	135.000.000	100%	175.000.000	100%	205.000.000	100%	240.000.000	100%	285.000.000	100%	285.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Lomba membaca Tahtim dan Do'a tingkat Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Lomba membaca Tahtim dan Do'a tingkat Kelurahan se Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	197.000.000	100%	210.000.000	100%	245.000.000	100%	280.000.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Festival seni Nasyid Tingkat Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Festival seni Nasyid Tingkat Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	701.000.000	100%	735.000.000	100%	765.000.000	100%	800.000.000	100%	845.000.000	100%	845.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Festival Budaya Islam Barjanji dan Marhaba Tingkat Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Festival Budaya Islam Barjanji dan Marhaba Tingkat Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	260.000.000	100%	295.000.000	100%	340.000.000	100%	340.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			<i>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.</i>																
			Upacara Hari Kebangkitan Nasional.	Dilaksanakannya Upacara Hari Kebangkitan Nasional.	100%	100%	70.000.000	100%	95.000.000	100%	135.000.000	100%	185.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik didukung oleh sumber daya manusia yan beriman dan berkualitas			Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia.	Dilaksanakannya Upacara Hari Proklamasi Republik Indonesia.	100%	100%	225.000.000	100%	295.000.000	100%	335.000.000	100%	385.000.000	100%	440.000.000	100%	440.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Upacara Hari Kesaktian Pancasila.	Dilaksanakannya Upacara Hari Kesaktian Pancasila .	100%	100%	55.000.000	100%	95.000.000	100%	135.000.000	100%	185.000.000	100%	240.000.000	100%	240.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Upacara Hari Pahlawan.	Dilaksanakannya Upacara Hari Pahlawan.	100%	100%	85.000.000	100%	150.000.000	100%	190.000.000	100%	240.000.000	100%	295.000.000	100%	295.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi

	Terwujudnya peningkatan SDM bidang pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan yang beriman, berkualitas, kompeten dan profesional		Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli.	Dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari Jadi Kota Tebing Tinggi 1 Juli.	100%	100%	770.000.000	100%	845.000.000	100%	885.000.000	100%	935.000.000	100%	990.000.000	100%	990.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Upacara Peringatan Hari KORPRI, Hari Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi.	Dilaksanakannya Upacara Peringatan Hari KORPRI, Hari Guru/PGRI, Hari Kesehatan di Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	65.000.000	100%	125.000.000	100%	165.000.000	100%	215.000.000	100%	270.000.000	100%	270.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Upacara Hari Peristiwa Berdarah 13 Desember.	Dilaksanakannya Upacara Hari Peristiwa Berdarah 13 Desember.	100%	100%	70.000.000	100%	105.000.000	100%	145.000.000	100%	195.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
			Sekretariat UKS Kota Tebing Tinggi.	Penyelenggaraan Sekretariat UKS Kota Tebing Tinggi.	100%	100%	70.000.000	100%	110.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	255.000.000	100%	255.000.000	Bag. Kesra	Tebing Tinggi
	Terwujudnya sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan taat hukum		Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi.																
			Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi.	Tersedianya peningkatan kapasitas SDM pada Bagian Adm. Humas PP.	70	80	350.000.000	80	385.000.000	85	423.500.000	85	465.850.000	90	512.435.000	90	2.136.785.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Program kerjasama informasi dan media massa.																
			Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.	Tersedianya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui release berita.	70	80	980.000.000	80	1.078.000.000	85	1.185.800.000	85	1.304.380.000	90	1.434.818.000	90	5.982.998.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	Tersedianya Majalah Sinergi untuk pnyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.	70	85	600.000.000	85	660.000.000	85	726.000.000	90	798.600.000	90	878.460.000	90	3.663.060.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi

			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.	Tersedianya kerjasama dengan media massa untuk penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat.	70	85	150.000.000	85	165.000.000	85	181.500.000	90	199.650.000	90	219.615.000	90	915.765.000	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
Terwujudnya sistem manajemen pemerintahan yang efektif, efisien dan responsibel.			Program Pengembangan dan Pelayanan Keprotokolan.																
			Pelayanan dan Pengembangan dan Kerjasama Penyelenggaraan Keprotokolan.	Tersedianya dekorasi untuk kegiatan keprotokolan.	80	90	85.000.000	90	93.500.000	95	102.850.000	95	113.135.000	95	124.448.500	95	518.933.500	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi
			Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.																
Terwujudnya tata kelola yang baik didukung oleh sumber daya manusia yang beriman dan berkualitas	Pelayanan publik yang berkualitas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan		Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Aparat Sipil Negara dan Non Pegawai Negeri.	Tersedianya jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan non pegawai negeri.		90	25.000.000	90	27.500.000	95	30.250.000	95	33.275.000	95	36.602.500	95	152.627.500	Bagian Adm. Humas PP	Tebing Tinggi

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan bidang urusabn dapat dilihat pada Tabel C.28 berikut :

Tabel C. 28 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kecamatan.	70 persen	80	85	90	95	95	95
2	Persentase implementasi hasil kesepakatan kerjasama.	60 persen	90	90	90	90	90	90
3	Nilai dan pemeringkatan LPPD.	2	3	3	3	3	3	3
4	Jumlah pilar batas daerah.	0 Pilar	10	15	20	25	0	70
5	Menghadiri dan mengikuti Rakernas APEKSI	1 Kegiatan	1	1	1	1	1	5
6	Evaluasi perkembangan kelurahan	60 persen	60	70	75	80	95	95
7	Tingkat pelayanan publik berbasis content teknologi informasi e-kecamatan dan e-kelurahan.	40 persen	60	70	75	80	95	95
8	Jumlah sertifikat tanah yang didaftarkan	0 persen	70	90	0	0	0	90
9	Persentase penanganan masalah hukum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase Produk hukum daerah dan kajian Perda yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Persentase Perda dan Perwa yang dihasilkan	80%	80%	80%	85%	85%	85%	85%
12	Persentase Produk Hukum Daerah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Persentase Sosialisasi/Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase Produk Hukum yang dapat diakses melalui internet oleh pegawai pemerintah dan masyarakat	0%	0%	0%	80%	100%	100%	100%
15	persentase seluruh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan analisis jabatan	70%	75%	80%	90%	100%	100%	100%

16	jumlah organisasi perangkat daerah yang telah terevaluasi kelembagaannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	jumlah organisasi perangkat daerah yang telah melaksanakan survey IKM	0%	70%	80%	90%	100%	100%	100%
18	jumlah organisasi perangkat daerah yang telah memiliki standar operasional prosedur (SOP)	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Tingkat akuntabilitas kinerja kondisi awal CC menjadi B	CC	CC	CC	C	C	B	100%
20	Prosentase Paket Pengadaan barang/jasa yang metode pelaksanaannya dilakukan melalui pelayanan yang efisien, transparan, akuntabel dan profesional berbasis teknologi informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	Terpublikasinya Dokumen SiRUP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Terjaganya Stabilitas Harga Pangan pokok	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
23	Termonitornya penyaluran LPG bersubsidi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
24	Terkoordinasi dan termonitornya perkembangan perusahaan daerah, koperasi dan UMKM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
25	Tersosialisasinya Terlaksananya sosialisasi pengembangan usaha (Diskusi perspektif Ekonomi)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
26	Terselenggaranya operasi pasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
27	Terselenggaranya Pameran (Expo) Produk Tebing Tinggi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
28	Terselenggaranya operasionalPendistribusian RASTRA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	Peringatan hari - hari besar keagamaan	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
30	Jumlah Rumah Ibadah yang menyelenggarakan pelatihan bidang agama	110 Rumah Ibadah	140%	20%	20%	20%	20%	250 rumah ibadah
31	Pengembangan potensi masyarakat dalam bidang agama dan seni	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
32	Peringatan Hari - hari besar Nasional dan Daerah	100%	20%	20%	20%	20%	20%	100%
33	Terlaksananya kegiatan kedinasan KDH dan WKDH	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Meningkatnya kapasitas SDM mengenai jurnalistik, kehumasan dan keprotokolan.	80%	80	80	85	85	90	90
35	Tersediannya informasi kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	70%	70	70	75	75	80	80
36	Tertingkatnya jumlah partisipasi media jumlah media massa yang mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.	70%	70	75	80	85	90	90
37	Terpublikasikannya Kegiatan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui media pemerintah, media luar ruang dan media elektronik	70%	70	75	80	85	90	90

38	Terlaksananya kerjasama dengan media massa dalam rangka public awareness campaign.	70%	70	70	75	75	80	80
39	Kelancaran pelaksanaan pelayanan kedinasan kepala daerah, sekda, asisten, staf ahli dan keprotokolan Pemda.	90%	90	90	95	95	95	95

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Sekretariat Daerah) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota–Wakil Walikota untuk melaksanakan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2017–2022, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Tebing Tinggi Tahun 2013–2033, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN.

Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat ditentukan oleh peran dan sinergi dari pemangku-pemangku kepentingan baik eksekutif, legislatif, dunia usaha/swasta, masyarakat, LSM, maupun media.